

PROFIL PENDUDUK LANJUT USIA

PROVINSI JAWA TIMUR

2019

PROFIL PENDUDUK LANJUT USIA

PROVINSI JAWA TIMUR

2019



Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur 2019

ISBN : 978-623-7521-44-0

No. Publikasi : 35520.2009

Katalog : 4104001.35

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xiv + 119 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Desain Sampul Muka:

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dicetak oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur 2019

Tim Penyusun

Profil Penduduk Lanjut Usia

Provinsi Jawa Timur

2019

Pengarah:

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si., M.Si.

Penanggung Jawab:

Asim Saputra, S.ST., M.Si.

Penyunting:

Evy Trisusanti, S.Si., M.T., M.Sc.

Penulis dan Pengolah Data:

Abdus Salam, S.ST., M.E.

Desain Cover:

Arga Parama Yuvinda, S.ST.

Kata Pengantar

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia atau dikenal dengan lansia merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Peningkatan penduduk lansia berjalan beriringan dengan semakin tingginya angka harapan hidup penduduknya. Dari proyeksi penduduk 2020-2010, diketahui penduduk lansia di Jawa Timur pada Tahun 2019 telah mencapai 13,06 persen yang menandakan bahwa struktur penduduk Jawa Timur tergolong penduduk tua. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi baik berupa potensi dan tantangan dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Penduduk lansia mempunyai karakter sosial ekonomi yang berbeda dibanding dengan penduduk muda, sehingga membutuhkan perhatian khusus bagi para pengambil kebijakan agar arah pembangunan juga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk lansia.

Publikasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan penduduk lansia di Jawa Timur. Data yang disajikan dalam publikasi ini meliputi kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi dari para penduduk lansia di Jawa Timur pada Tahun 2019. Sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah hasil Survei Sosial

Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang ditujukan untuk pengembangan serta penyempurnaan publikasi ini di kemudian hari. Semoga publikasi ini memberi manfaat bagi para pengguna data dan khususnya para pengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan yang mengayomi kepentingan penduduk lansia di Jawa Timur.

Surabaya, Desember 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur



Dr. Dadang Hardiwan, S.Si., M.Si.

Daftar Isi

Uraian	Halaman
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Sistematika Penyajian	5
Bab II Metodologi	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Ruang Lingkup.....	8
2.3 Konsep dan Definisi	9
2.4 Keterbatasan Data	17
2.5 Metode Analisis	18
Bab III Demografi	19
3.1 Struktur Penduduk Jawa Timur	21
3.2 Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia	24
3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia	26

3.4 Status Perkawinan Penduduk Lansia	28
3.5 Peran Penduduk Lansia dalam Rumah Tangga	30
Bab IV Pendidikan	35
4.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	37
4.2 Kemampuan Membaca dan Menulis	40
4.3 Fasilitas Teknologi Informasi	45
Bab V Kesehatan	49
5.1 Keluhan Kesehatan	53
5.2 Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>) Lansia	56
5.3 Cara Berobat	59
Bab VI Ketenagakerjaan.....	67
6.1 Partisipasi Angkatan Kerja	69
6.2 Karakteristik Lansia Bekerja.....	73
6.3 Lapangan Usaha.....	80
6.4 Status Pekerjaan	83
6.5 Jumlah Jam Kerja	86
6.6 Upah/Pendapatan	88
Lampiran	91

<https://jatim.bps.go.id>

Daftar Tabel

No.	Judul	Hal
Tabel 3.1	Perkiraan Jumlah dan Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2019	25
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2019	29
Tabel 3.3	Perkiraan Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Tipe Daerah, 2019.....	31
Tabel 3.4	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2019	32
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019.....	38
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2019	42
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Akses Teknologi Informasi, 2019	46
Tabel 5.1	Angka Kesakitan Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Usia, 2019	57

No.	Judul	Hal
Tabel 5.2	Persentase Penduduk Lansia Dengan Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Cara Berobat, 2019	60
Tabel 5.3	Persentase Penduduk Lansia yang Tidak Berobat Jalan Menurut Kelompok Usia, Tipe Daerah, dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2019	61
Tabel 6.1	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status dalam Rumah Tangga, 2019	77
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019	79
Tabel 6.3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Usia, Tipe Daerah, Lapangan Usaha, 2019	81
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Usia, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Lapangan Usaha, 2019	82
Tabel 6.5	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2019	84

No.	Judul	Hal
Tabel 6.6	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2019	87
Tabel 6.7	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Per Bulan, 2019.....	89

<https://jatim.bps.go.id>

Daftar Gambar

No.	Judul	Halaman
Gambar 3.1	Struktur Usia Penduduk Jawa Timur, 2019	22
Gambar 3.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin, 2017-2019	27
Gambar 4.1	Angka Buta Aksara/Huruf Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin, 2014-2019	44
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah 2019	54
Gambar 5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, 2014-2019	56
Gambar 5.3	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan dan Tempat Berobat Jalan Menurut Tipe Daerah, 2019	64
Gambar 6.1	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Kelompok Usia, 2019	70

Gambar 6.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Tipe Daerah, 2019	71
Gambar 6.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2019	73
Gambar 6.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Tipe Daerah, 2019.....	74
Gambar 6.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2019.....	75
Gambar 6.6	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2019.....	76
Gambar 6.7	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Status Pekerjaan, 2019.....	86

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 adalah “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”. Berdasarkan visi tersebut, tercermin bahwa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara merata untuk semua golongan masyarakat, tidak terkecuali pada golongan penduduk lanjut usia (lansia), adalah hal yang ingin dicapai. Kebijakan kelanjutusiaan juga tertuang dalam RPJMN Indonesia 2015-2019 yaitu peningkatan penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini pun sejalan dengan target dan sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu memenuhi hak setiap orang tanpa memandang kelompok usia dan fokus khusus pada kelompok rentan termasuk lansia.

Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup pada kelompok lansia tercermin dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk yang tak lepas dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Bertambahnya sarana dan prasarana kesehatan yang dibarengi oleh peningkatan pelayanan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan jaminan kesehatan secara signifikan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk senantiasa dalam kondisi sehat sehingga peluang untuk hidup lebih lama pun semakin meningkat. Di sisi lain, pendidikan juga sangat memengaruhi pola pikir masyarakat untuk hidup lebih sehat dan menambah pengetahuan masyarakat akan pilihan-pilihan baik untuk hidup sehat ataupun pilihan-pilihan pengobatan atas penyakit yang diderita sehingga akan memperpanjang peluang mereka untuk hidup.

Namun demikian, implikasi ekonomis yang penting dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah peningkatan dalam rasio ketergantungan lanjut usia (*old age dependency ratio*). Setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Peningkatan jumlah penduduk lansia akan berdampak dua sisi, positif dan negatif, terhadap sosial ekonomi baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam negara. Dampak ini bergantung seberapa baik kehidupan lansia dipersiapkan. Dampak positif terjadi ketika penduduk lansia berada dalam kondisi mandiri, sehat, aktif dan produktif sehingga golongan lansia ini sedikit banyak

membantu kesejahteraan keluarga. Para lansia tersebut akan meringankan beban penduduk usia produktif yang seharusnya menanggung hidup para lansia. Sebaliknya, peningkatan jumlah penduduk lansia akan menjadi tantangan saat persiapan menuju masa tua tidak dilakukan dengan baik sehingga mengakibatkan lansia jauh dari kondisi sehat, aktif, dan produktif. Hal ini tentunya akan menambah beban penduduk usia produktif terhadap penduduk lansia.

Menjadi tua merupakan fase kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Secara fisik, orang lanjut usia mengalami kemunduran fungsi alat tubuh, atau disebut juga dengan proses *degenerative* sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat menunjang derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia agar tetap sehat, mandiri, dan berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Pemerintah memberikan perhatian terhadap lansia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Selain itu, perhatian terhadap lansia diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menjadikan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Lansia Sedunia yang tertuang dalam resolusi PBB No. 045/206 tahun 1991. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti resolusi PBB tersebut dengan menetapkan Hari

Lansia di Indonesia pada tanggal 29 Mei. Diharapkan dengan memperingati Hari Lansia tersebut, pemerintah dan masyarakat lebih peduli terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup lansia.

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup lansia, perlu upaya pemberdayaan guna menunjang derajat kesehatan dan peningkatan mutu kehidupan lansia. Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Arah pemberdayaan dilakukan dengan cara lansia aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik, dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan tidak hanya dilakukan terhadap para lansia dan keluarganya, melainkan juga dilakukan terhadap seluruh komponen bangsa. Untuk itu, arah dan strategi pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk lansia sebaiknya dilakukan secara terpadu dan lintas sektor.

Sejalan dengan itu, tersedianya data statistik dan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran makro kondisi dan

potensi penduduk lansia di berbagai aspek penting, seperti demografi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan pada level nasional maupun provinsi, diharapkan dapat membantu mempertajam arah dan sasaran pembangunan serta pemberdayaan penduduk lansia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran makro situasi dan kondisi penduduk lansia di Jawa Timur dilihat dari berbagai aspek, antara lain demografi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Gambaran situasi dan kondisi penduduk lansia Jawa Timur dalam publikasi ini disajikan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Penyajian publikasi ini diharapkan berguna terutama bagi peneliti, perencana, dan pengambil keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang berorientasi pada penduduk lansia.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur 2019 ini disajikan dalam enam bagian. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan publikasi ini;

maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Kemudian pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi berupa sumber data; ruang lingkup; konsep dan definisi; keterbatasan data; serta metode analisis.

Empat bagian berikutnya menyajikan gambaran situasi dan kondisi penduduk lansia di Jawa Timur, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis penduduk lansia; bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan akses fasilitas teknologi informasi; bagian kelima (Bab V) mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan; bagian keenam (Bab VI) mengenai kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, dan status pekerjaan serta upah/pendapatan penduduk lansia yang bekerja.

2.1. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur 2019 adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta data Proyeksi Penduduk. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas Maret Tahun 2019, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi penduduk lansia dari sisi demografi, kesehatan, dan pendidikan. Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, Susenas dilaksanakan setiap tahun. Mulai tahun 2011, Susenas dilaksanakan secara Triwulan (Triwulan I-IV) yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan

Desember. Selanjutnya, mulai tahun 2015 pelaksanaan Susenas menjadi 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September.

- b. Data Sakernas Agustus Tahun 2019, yang digunakan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan penduduk lansia.

Sakernas merupakan survei khusus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. BPS telah melaksanakan Sakernas sejak tahun 1976. Hingga saat ini Sakernas telah mengalami berbagai perubahan, baik waktu pelaksanaan, level estimasi, cakupan maupun metodologi, mulai tahun 2015 Sakernas dilaksanakan tiap semester, yakni pada bulan Februari dan Agustus.

- c. Data Proyeksi Penduduk tahun 2019, digunakan untuk memperoleh struktur penduduk Jawa Timur, distribusi dan komposisi serta rasio ketergantungan penduduk lansia.

2.2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas Maret 2019 mencakup 30.160 rumah tangga sampel yang tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Data hasil pencacahan tersebut dapat disajikan baik untuk tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. Susenas tidak mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya. Susenas juga tidak mencakup rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa.

Sakernas merupakan salah satu survei yang dilaksanakan BPS untuk menghasilkan data sampai level kabupaten/kota. Pada tahun 2019, jumlah Sakernas mencakup 29.960 rumah tangga sampel. Sama halnya dengan Susenas, Sakernas juga tidak mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus atau juga rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa.

2.3. Konsep dan Definisi

- a. **Penduduk Lanjut Usia (Lansia)** adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas.
- b. **Penduduk Pra Lansia** adalah penduduk berusia 45-59 tahun.
- c. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau pedesaan.
- d. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

Rumah Tangga Lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berusia 60 tahun ke atas.

- e. **Kepala Rumah Tangga (KRT)** adalah salah seorang dari anggota rumah tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga.
- f. **Anggota Rumah Tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- g. **Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia** adalah perbandingan antara jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun).
- h. **Belum Kawin** adalah belum pernah terikat dalam perkawinan.
- i. **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat disekelilingnya dianggap sebagai suami-isteri.
- j. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, atau untuk keperluan lain. Perempuan yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.
- k. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.
- l. **Pendidikan:**

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- m. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- n. **Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/ sederajat) maupun pendidikan non-formal berupa

pendidikan kesetaraan (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan instansi lainnya.

- o. **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum Tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD Sederajat meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP Sederajat meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SMA Sederajat meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademik/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar

sarjana muda, program pendidikan diploma 4 atau strata 1, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- p. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf *Braille*. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

- q. **Lansia Muda** adalah penduduk lanjut usia dengan usia 60-69 tahun.
- r. **Lansia Menengah/Madya** adalah penduduk lanjut usia dengan usia 70-79 tahun.
- s. **Lansia Tua** adalah penduduk lanjut usia dengan usia 80 tahun ke atas.
- t. **Keluhan Kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, perbuatan kriminal, dan lain-lain.
- u. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan pekerjaan,

sekolah, atau kegiatan sehari-hari terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

- v. **Angkatan Kerja Penduduk Lansia** adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan (baik bekerja maupun sementara tidak bekerja) atau tidak mempunyai pekerjaan tapi sedang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah kegiatan dari mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha atau tidak sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang berusaha mencari pekerjaan.

Mempersiapkan Suatu Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru' (bukan pengembangan suatu usaha), yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya.

- w. **Bukan Angkatan Kerja Lansia** adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang tidak melakukan kegiatan apa-apa.

- x. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia** adalah persentase angkatan kerja penduduk lansia terhadap penduduk lansia. TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK_{Lansia} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Lansia}}{\text{Jumlah Penduduk Lansia}} \times 100\%$$

- y. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.
- z. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.
- aa. **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

2.4. Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS, termasuk Susenas dan Sakernas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus tidak dicakup dalam survei.

2.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar atau grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah kabupaten/kota. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai lansia selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan Lampiran Tabel untuk melihat data pada tingkat kabupaten/kota.

BAB 3

DEMOGRAFI

Demografi adalah studi tentang perubahan jumlah, distribusi, komposisi, dan keragaman penduduk dari waktu ke waktu. Sebagaimana diketahui, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jumlah penduduk yang besar ini jika dikelola dengan baik akan menjadi modal dasar dan aset yang berharga dalam proses pembangunan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menjadi sangat penting karena selain sebagai sasaran dari pembangunan, penduduk juga sebagai pelaku dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan suatu wilayah sangat bergantung kepada penduduknya. Jika penduduk wilayah tersebut berkualitas, maka akan menjadi sumber daya dan potensi yang sangat kuat dalam pembangunan. Begitu pun sebaliknya. Salah satu indikator kualitas penduduk sekaligus indikator keberhasilan dari pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk di wilayah tersebut.

Perencanaan yang tepat diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai, terutama ketika memposisikan penduduk sebagai sasaran maupun pelaku pembangunan. Oleh karena itu, data demografi sangat diperlukan ketika melakukan kegiatan perencanaan pembangunan serta menetapkan prioritas pembangunan dalam bidang kependudukan. Salah satu jenis data dasar kependudukan yang sangat penting adalah data mengenai komposisi penduduk menurut usia atau kelompok usia antara lain digunakan untuk menentukan kelompok sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan usia tertentu. Misalnya, penduduk usia 0-4 tahun atau anak balita merupakan kelompok sasaran untuk program imunisasi yang merupakan salah satu program pembangunan di bidang kesehatan. Penduduk usia sekolah yang mencakup penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun merupakan kelompok sasaran untuk pembangunan bidang pendidikan.

Kelompok sasaran pembangunan yang juga menjadi perhatian adalah penduduk usia 60 tahun keatas atau lansia. Komposisi usia penduduk dunia telah berubah sejak abad ke-20 dan berlanjut hingga abad ke-21, yaitu jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan. Hal tersebut juga terjadi baik di Indonesia maupun di Jawa Timur. Peningkatan penduduk lansia merupakan bagian dari proses transisi demografi bahwa kemajuan pembangunan diyakini sebagai faktor signifikan terjadinya

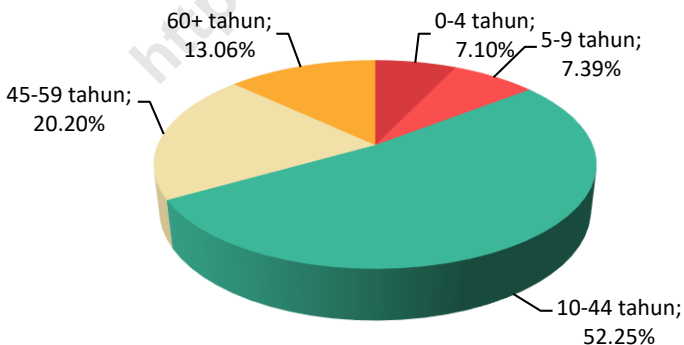
perubahan struktur penduduk. Dua faktor kependudukan yang saling melengkapi adalah penurunan tingkat mortalitas yang diiringi dengan semakin rendahnya angka fertilitas. Hal ini merupakan dampak dari perubahan nilai pada masyarakat yang semakin anti-mortalitas, kesadaran pentingnya hidup sehat dan perencanaan kelahiran yang baik, serta kemajuan teknologi kedokteran. Sejalan dengan itu, maka perumusan dan arah kebijakan pembangunan salah satunya ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia. Oleh karenanya, dibutuhkan data atau informasi dasar yang berkaitan dengan jumlah dan struktur demografi penduduk lansia. Tersedianya data dasar tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran serta target pembangunan. Uraian pada bab ini difokuskan untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi penduduk lansia serta perkembangannya menurut karakteristik demografis antara lain usia, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan struktur penduduk dalam rumah tangga.

3.1. Struktur Penduduk Jawa Timur

Suatu daerah dikatakan memiliki struktur penduduk tua jika mempunyai populasi lansia diatas tujuh persen (Soeweno, 2009). Gambar 3.1 memperlihatkan persentase lansia di Jawa Timur telah mencapai 13,06 persen dari keseluruhan penduduk, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,64 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa Jawa Timur termasuk daerah dengan struktur penduduk menuju tua (*ageing population*). Struktur penduduk yang menuju tua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia, yaitu adanya peningkatan usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat yang meningkat. Keberhasilan tersebut akan semakin berarti jika penduduk lansia bisa mandiri, berkualitas, serta dapat berperan dalam pembangunan. Selain menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, peningkatan jumlah lansia ini juga merupakan tantangan dalam pembangunan.

Gambar 3.1.
Struktur Usia Penduduk Jawa Timur, 2019



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Keberadaan lansia tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kepedulian

akan kesejahteraan lansia tertuang dalam Undang-Undang No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Amanat dari undang-undang tersebut adalah pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar atau bahkan lebih baik lagi.

Dari Lampiran Tabel 3.3 terlihat bahwa semua kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki penduduk lansia di atas 7 persen. Hanya lima kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki persentase penduduk lansia dibawah 10 persen. Selain Kota Surabaya (8,84 persen), kabupaten/kota di sekitarnya seperti Kabupaten Sidoarjo (7,89 persen), Kota Pasuruan (9,13 persen), Kabupaten Gresik (9,45 persen), dan Kabupaten Pasuruan (9,79 persen) merupakan daerah dengan persentase penduduk lansia relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sebagai daerah di sekitar Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, kabupaten/kota tersebut merupakan lahan investasi yang banyak menyerap tenaga kerja yang didominasi penduduk usia produktif (15-59 tahun). Di sisi lain, mahalnya harga tempat hunian di Kota Surabaya menjadikan kabupaten/kota tersebut sebagai alternatif yang menarik bagi pelaku komuter dan mobilitas sirkuler untuk bertempat tinggal di perbatasan kota besar yang biasanya memiliki biaya hidup relatif lebih murah dibandingkan tinggal di kawasan tengah kota. Keberadaan pelaku mobilitas yang biasanya kelompok muda inilah yang memiliki pengaruh besar dalam

komposisi penduduk di beberapa kabupaten/kota tersebut. Sebaliknya, persentase penduduk lansia tertinggi di Jawa Timur berada di Kabupaten Magetan (19,73 persen) dan Kabupaten Pacitan (19,67 persen). Hampir seperlima penduduknya merupakan lansia.

3.2. Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia

Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Secara rata-rata angka harapan hidup perempuan di Jawa Timur hampir empat tahun lebih lama dibandingkan laki-laki. Pada Tahun 2019 angka harapan hidup perempuan mencapai 73,15 tahun dan laki-laki mencapai 69,30 tahun. Akibatnya, keberadaan penduduk lansia perempuan akan cenderung lebih banyak daripada lansia laki-laki. Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa pada tahun 2019, jumlah lansia perempuan di Jawa Timur mencapai 2,77 juta orang, lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki yang mencapai 2,41 juta orang. Demikian juga proporsi lansia perempuan terhadap total penduduk perempuan (13,79 persen) di Jawa Timur menunjukkan proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan proporsi lansia laki-laki terhadap total penduduk laki-laki (12,30 persen). Sejalan dengan usia harapan hidup penduduk perempuan dan laki-laki, selisih proporsi lansia perempuan terhadap proporsi lansia laki-laki melebar seiring penambahan kelompok usia.

Tabel 3.1
Perkiraan Jumlah dan Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia Menurut
Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2019

Kelompok Usia	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+P	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pra Lansia	3.892.465	19,86	4.127.099	20,54	8.019.564	20,20
45-54 tahun	2 745 290	14,01	2.897.625	14,42	5.642.915	14,21
55-59 tahun	1.147.175	5,85	1.229.474	6,12	2.376.649	5,99
Lansia	2.411.346	12,30	2.772.101	13,79	5.183.447	13,06
60-69 tahun	1.590.608	8,12	1.648.761	8,20	3.239.369	8,16
70-74 tahun	407.247	2,08	494.374	2,46	901.621	2,27
75 tahun +	413.491	2,11	628.966	3,13	1.042.457	2,63

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

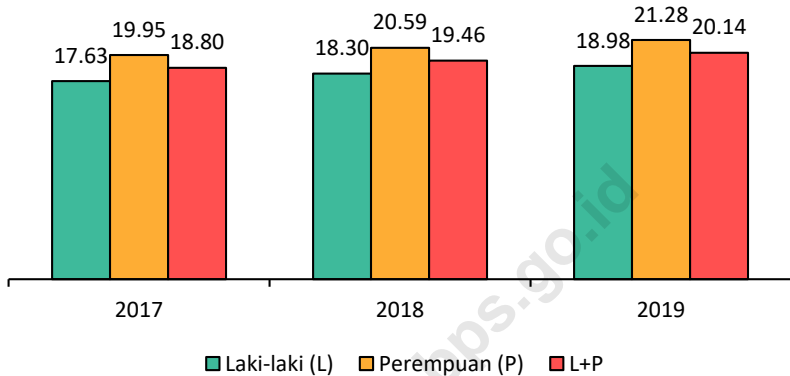
Ageing merupakan proses menua, sehingga mewujudkan *active ageing* (menua dengan aktif) tidak cukup pada kelompok penduduk berusia 60 tahun ke atas, melainkan pada seluruh tahapan siklus manusia. Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan keberadaan penduduk lansia saat ini, tetapi juga perlu memetakan para penduduk lansia di masa depan, yaitu penduduk 45-59 tahun yang selanjutnya disebut penduduk pra lansia. Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa penduduk pra lansia tahun 2019 mencapai 20,20 persen. Persentase penduduk pra lansia perempuan (20,54 persen) lebih

tinggi daripada penduduk pra lansia laki-laki (19,86 persen). Mempersiapkan penduduk pra lansia dengan baik menyongsong masa lansianya menjadi hal yang perlu dilakukan agar nantinya bisa menjadi lansia yang mandiri, tangguh, dan produktif.

3.3. Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia

Terus bertambahnya jumlah penduduk lansia di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengubah struktur penduduk. Salah satu implikasinya adalah bertambahnya rasio ketergantungan penduduk lansia (*old dependency ratio*). Rasio ketergantungan lansia merupakan perbandingan antara jumlah penduduk lansia terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun). Angka tersebut mencerminkan besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lansia, dengan asumsi bahwa penduduk lansia tersebut bukanlah penduduk lansia yang produktif. Angka tersebut juga mencerminkan ketersediaan tenaga kerja produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan penduduk lansia maka semakin banyak tersedia tenaga kerja yang produktif. Rasio ketergantungan penduduk lansia disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2.
Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia
Menurut Jenis Kelamin, 2017 – 2019



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Angka rasio ketergantungan penduduk lansia Jawa Timur pada Tahun 2019 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020 sebesar 20,14. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 20 orang penduduk lansia. Dikaitkan dengan keberadaan lansia perempuan yang cenderung lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki, maka akan lebih banyak lansia perempuan yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Hal ini terlihat dari Gambar 3.2, rasio ketergantungan penduduk lansia perempuan (21,28) yang lebih tinggi daripada penduduk lansia laki-laki (18,98).

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk lansia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 juga terlihat dari Gambar 3.2. Rasio ketergantungan penduduk lansia, baik lansia laki-laki maupun lansia perempuan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk lansia yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Beban penduduk usia produktif tersebut akan berkurang bila penduduk lansia yang ada tangguh, sehat, dan produktif serta memiliki jaminan sosial yang memadai.

3.4. Status Perkawinan Lansia

Salah satu komposisi penduduk yang menarik untuk diamati adalah komposisi penduduk lansia menurut status perkawinan. Berdasarkan Susenas 2019, sebagian besar penduduk lansia di Jawa Timur berstatus kawin yaitu 58,96 persen, diikuti dengan lansia berstatus cerai mati sebesar 38,03 persen. Penduduk lansia yang berstatus cerai hidup sebesar 2,28 persen dan yang belum kawin sebesar 0,74 persen (Tabel 3.2). Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan pola status perkawinan antara penduduk lansia laki-laki dengan penduduk lansia perempuan. Sebagian besar lansia laki-laki memiliki status kawin, yaitu 82,17 persen dan lansia laki-laki yang berstatus cerai mati sebanyak 15,72 persen. Sementara itu, pada penduduk lansia perempuan tercatat hanya sekitar 38,80 persen

lansia perempuan yang berstatus kawin. Proporsi status perkawinan terbesar pada lansia perempuan justru adalah para lansia perempuan yang berstatus cerai mati, yaitu 57,41 persen.

Tabel 3.2.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2019

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	0,88	79,92	1,89	17,30	100,00
Perempuan (P)	0,98	39,78	3,03	56,21	100,00
L + P	0,94	58,91	2,49	37,67	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	0,22	84,52	1,19	14,06	100,00
Perempuan (P)	0,79	37,86	2,79	58,56	100,00
L + P	0,54	59,01	2,07	38,38	100,00
K + D					
Laki-laki (L)	0,56	82,17	1,55	15,72	100,00
Perempuan (P)	0,89	38,80	2,91	57,41	100,00
L + P	0,74	58,96	2,28	38,03	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan relatif memiliki usia panjang dibandingkan laki-laki. Ketika suatu pasangan memasuki usia tua, istri/perempuan cenderung akan lebih dahulu ditinggal mati oleh pasangannya. Di satu sisi, hal ini juga memberikan indikasi yang menarik dari sisi pola perkawinan. Perempuan,

terutama pada usia tua, cenderung untuk tidak bersegera menikah lagi ketika ditinggal mati oleh pasangannya yang terdahulu atau bahkan memilih untuk tetap menjanda hingga akhir hayatnya. Hal ini sangat berbeda dengan laki-laki yang biasanya akan segera menikah kembali ketika dirinya ditinggal oleh sang istri/pasangannya karena tidak bisa “sendiri” sehingga lansia laki-laki yang berstatus cerai mati atau duda relatif lebih sedikit. Pola yang sama terjadi pada semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana data pada lampiran Tabel 3.4.1-Tabel 3.4.3. Selain itu, baik di perkotaan maupun di perdesaan juga memberikan pola status perkawinan yang serupa untuk laki-laki dan perempuan, yaitu bahwa penduduk lansia laki-laki lebih banyak berstatus kawin, sedangkan penduduk lansia perempuan lebih banyak yang berstatus cerai mati.

3.5. Peran Penduduk Lansia Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga penduduk lansia didefinisikan sebagai rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berusia 60 tahun ke atas. Dari hasil Susenas 2019 diperkirakan jumlah rumah tangga penduduk lansia mencapai 3,99 juta rumah tangga. Tiap 100 rumah tangga di Jawa Timur, sekitar 35-36 diantaranya merupakan rumah tangga yang memiliki ART lansia. Rumah tangga dengan lansia di perdesaan juga cenderung lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3 berikut, proporsi

rumah tangga yang beranggotakan lansia di perdesaan sebesar 38,13 persen sementara yang tinggal di perkotaan sebesar 33,35 persen.

Tabel 3.3
Perkiraan Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Lansia
Menurut Tipe Daerah, 2019

Rincian	Tipe Daerah		
	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah rumah tangga lansia	1 995 472	1 998 407	3 993 879
Persentase rumah tangga lansia	33,35	38,13	35,58

Sumber: Susenas, 2019.

Berkaitan dengan keberadaan penduduk lansia dalam suatu rumah tangga perlu dikaji peranan penduduk lansia tersebut dalam rumah tangga. Idealnya penduduk lansia dalam rumah tangga adalah sebagai agen transfer pengetahuan kepada generasi selanjutnya dan semestinya peran tersebut tidak membebani para penduduk lansia. Dalam suatu rumah tangga penduduk lansia dapat berperan sebagai kepala rumah tangga (KRT), istri/pasangan, orang tua/mertua KRT atau lainnya. Dari peran tersebut, peran sebagai KRT adalah yang paling berat karena KRT adalah orang yang bertanggung jawab secara ekonomi atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Peranan KRT sangat menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung jawab secara ekonomi, KRT

juga harus mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan sebagai pengambil keputusan.

Tabel 3.4.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin,
dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2019

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kepala Rumah Tangga	Istri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	89,14	0,88	8,14	1,84	100,00
Perempuan (P)	32,96	35,71	27,04	4,28	100,00
L + P	59,73	19,11	18,04	3,12	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	89,48	0,86	8,14	1,52	100,00
Perempuan (P)	31,80	34,00	29,92	4,28	100,00
L + P	57,95	18,97	20,05	3,03	100,00
K + D					
Laki-laki (L)	89,31	0,87	8,14	1,68	100,00
Perempuan (P)	32,37	34,83	28,52	4,28	100,00
L + P	58,84	19,04	19,04	3,07	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Dari Tabel 3.4, terlihat bahwa sebagian besar penduduk lansia berperan sebagai kepala rumah tangga (KRT) yaitu 58,84 persen. Sementara sebagian kecil lainnya berperan sebagai mertua/orang tua (19,04 persen), pasangan KRT (19,04 persen), dan lainnya 3,07

persen. Pola yang sama terlihat baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Dari tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa sekitar 8-9 dari tiap 10 lansia laki-laki berperan sebagai KRT, sedangkan hanya 3-4 dari tiap 10 lansia perempuan berperan sebagai KRT. Penduduk lansia laki-laki lebih cenderung berperan sebagai KRT, sementara peran penduduk lansia perempuan dalam rumah tangga relatif berimbang antara sebagai KRT, istri/pasangan KRT, dan mertua/orang tua.

Meski demikian, proporsi peran lansia perempuan terbesar adalah sebagai istri/pasangan (34,83 persen). Proporsi peran lansia perempuan terbesar sebagai pasangan KRT terjadi di semua tipe daerah, baik perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, terlihat bahwa proporsi lansia perempuan yang berperan sebagai orang tua/mertua (28,52 persen) jauh lebih besar dibandingkan proporsi lansia laki-laki sebagai orang tua/mertua (8,23 persen). Dikaitkan dengan pola status perkawinan penduduk lansia perempuan yang sebagian besar berstatus cerai mati, mereka yang berstatus cerai mati tersebut cenderung tinggal dengan anak/menantunya daripada memilih untuk menikah lagi.

BAB 4

PENDIDIKAN

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, di Pasal 31 Ayat (1) juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia.

Baik usia muda maupun tua mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Bagi penduduk usia muda, pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Sedangkan penduduk yang berusia tua pun juga perlu

mendapatkan pendidikan, seperti yang tertuang dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab III Pasal 5 Ayat (2) poin d tentang hak dan kewajiban lansia, bahwa lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan timbul rasa kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam UU tersebut Bab VI Pasal 16 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan UU tersebut, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan penduduk lansia, antara lain program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) dan dilanjutkan dengan program keaksaraan (keaksaraan fungsional). Keseluruhan program yang diselenggarakan pemerintah tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa.

Program pembangunan pendidikan serta pengembangan dan peningkatan keterampilan bagi penduduk lansia memerlukan penanganan yang lebih khusus dan terfokus. Hal ini sesuai dengan

karakteristik penduduk lansia yang berbeda dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja, dan pemuda. Jika kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja dan pemuda memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang makin berkembang dan meningkat, sebaliknya penduduk lansia memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang semakin menurun karena proses penuaan yang terjadi pada mereka secara alamiah.

4.1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Lansia yang masih bertahan sampai dengan sekarang adalah generasi terdahulu yang menikmati masa muda pada awal masa kemerdekaan. Oleh karenanya, tingkat pendidikan yang dicapai penduduk lanjut usia lebih merupakan cermin pendidikan tempo dulu. Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan pada masa tersebut masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi pendidikan para lansia tersebut.

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa sebagian besar penduduk lansia masih berpendidikan rendah. Ada sekitar 8 sampai 9 dari tiap 10 penduduk lansia di Jawa Timur berpendidikan SD kebawah. Terdapat sekitar 22 orang di antara 100 orang lansia yang tidak pernah sekolah. Sementara itu, penduduk lansia yang tidak tamat SD sebesar 34,01 persen dan yang menamatkan pendidikan di tingkat sekolah dasar/sederajat sebesar 29,52 persen.

Tabel 4.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Total
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat atau Lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	7,62	29,73	33,65	11,30	17,70	100,00
Perempuan (P)	20,25	33,74	29,42	8,16	8,43	100,00
L+P	14,23	31,83	31,44	9,66	12,85	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	19,28	36,15	34,76	4,81	5,00	100,00
Perempuan (P)	38,80	36,23	21,69	1,94	1,34	100,00
L+P	29,95	36,19	27,61	3,24	3,00	100,00
K+D						
Laki-laki (L)	13,31	32,87	34,20	8,13	11,49	100,00
Perempuan (P)	29,74	35,01	25,46	4,98	4,80	100,00
L+P	22,11	34,01	29,52	6,44	7,91	100,00

Sumber: Susenas 2019

Penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan cenderung mempunyai akses yang lebih baik dalam dunia pendidikan daripada penduduk lansia di daerah perdesaan. Proporsi lansia perdesaan yang tidak pernah bersekolah dua kali lipat proporsi lansia di perkotaan. Pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, proporsi penduduk lansia di perkotaan yang menamatkan pendidikan

SMP/ sederajat sebesar 9,66 persen, lebih tinggi daripada di perdesaan yang hanya 3,24 persen. Untuk jenjang SMA/ sederajat atau lebih, persentase penduduk lansia di perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut sebesar 12,85 persen atau empat kali lipat lebih dari persentase penduduk lansia di perdesaan yang menamatkan jenjang yang sama. Ketimpangan ini bisa terjadi karena fasilitas pendidikan di perkotaan yang lebih unggul dibandingkan di perdesaan sejak dulu atau mungkin juga disebabkan oleh migrasi penduduk dengan pendidikan tinggi dari perdesaan ke perkotaan.

Pola pendidikan yang ditamatkan penduduk lansia laki-laki dan perempuan pun terlihat berbeda. Penduduk lansia laki-laki cenderung mengenyam pendidikan yang lebih baik daripada penduduk lansia perempuan. Penduduk lansia laki-laki yang menamatkan pendidikan di setiap jenjang (tamat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat ke atas), persentasenya lebih tinggi dibandingkan penduduk lansia perempuan. Sementara itu, persentase penduduk lansia perempuan yang tidak pernah bersekolah (29,74 persen), lebih tinggi dua kali lipat persentase penduduk lansia laki-laki (13,31 persen). Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan adanya kesenjangan dalam bidang pendidikan antara lansia laki-laki dan perempuan.

Kondisi rendahnya pendidikan lansia merata di semua kabupaten/kota. Merujuk pada lampiran tabel 4.1.3 terlihat bahwa empat kabupaten/kota dengan proporsi penduduk lansia dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD/ sederajat ke bawah tertinggi adalah kabupaten/kota yang terletak di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Sampang (97,58 persen), Kabupaten Sumenep (97,46 persen), Kabupaten Lumajang (93,86 persen), dan Kabupaten Tuban (93,61 persen). Sementara itu, lima besar tertinggi kabupaten/kota di Jawa Timur dengan proporsi lansia berpendidikan SMA/ sederajat ke atas, yaitu Kota Madiun (41,43 persen), Kota Mojokerto (38,73 persen), Kota Blitar (30,35 persen), Kota Malang (19,23), dan Kota Surabaya (18,84 persen).

4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat bermanfaat bagi penduduk lansia. Melalui kemampuan membaca dan menulis, penduduk lansia dapat mengakses ilmu pengetahuan, menjadikannya sebagai alat komunikasi baik lewat kertas maupun media elektronik, dan dapat pula membantu pengentasan buta aksara generasi penerusnya. Seseorang akan lebih mudah menjalani kehidupannya sehari-hari jika memiliki kemampuan dasar berupa kemampuan membaca dan menulis.

Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis disebut buta aksara. Buta aksara merupakan indikator dasar yang bisa digunakan untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat. Angka buta aksara menunjukkan proporsi penduduk buta aksara terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Salah satu program pemerintah untuk mengurangi angka buta aksara adalah dengan Program Keaksaraan Fungsional (KF). Prioritas program KF adalah penduduk buta aksara usia 15-44 tahun. Namun dalam kenyataannya, hampir 10 persen peserta KF berusia 60 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar lansia masih cukup besar. Perlu diperhatikan, kemampuan membaca dan menulis bisa hilang seiring berjalannya waktu terlebih pada penduduk lansia baik itu disebabkan ingatan yang menurun (lupa), terlalu lama tidak menggunakan kemampuan tersebut atau faktor lainnya.

Lebih dari 70 persen penduduk lansia di Provinsi Jawa Timur mampu membaca dan menulis pada tahun 2019. Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat bahwa persentase penduduk lansia yang mampu membaca dan menulis huruf latin saja sebesar 40,11 persen, mampu membaca dan menulis huruf lainnya saja sebesar 1,99 persen, serta mampu membaca dan menulis huruf latin dan lainnya sebesar 28,20 persen. Sementara itu penduduk lansia yang sama sekali tidak mampu membaca dan menulis sebesar 29,70 persen.

Tabel 4.2.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2019

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kemampuan Membaca dan Menulis				Total
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin dan Lainnya	Tidak Dapat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	45,69	0,84	41,76	11,71	100,00
Perempuan (P)	42,06	2,31	29,02	26,61	100,00
L+P	43,79	1,61	35,09	19,51	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	42,65	2,02	28,69	26,64	100,00
Perempuan (P)	31,29	2,65	15,26	50,80	100,00
L+P	36,44	2,37	21,35	39,85	100,00
K+D					
Laki-laki (L)	44,21	1,42	35,36	19,01	100,00
Perempuan (P)	36,54	2,49	21,98	38,99	100,00
L+P	40,11	1,99	28,20	29,70	100,00

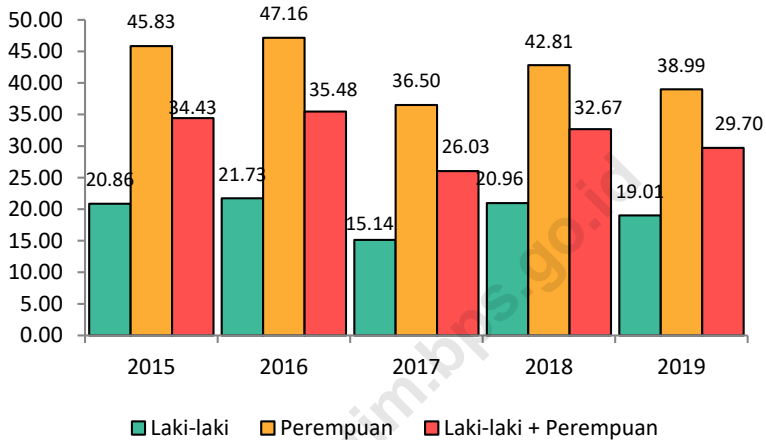
Sumber: Susenas, 2019

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa penduduk lansia di perkotaan lebih banyak yang mampu membaca dan menulis daripada di perdesaan. Penduduk lansia di perkotaan yang mampu membaca dan menulis sebesar 80,49 persen, yang terdiri dari mampu membaca dan menulis huruf latin saja sebesar 43,79 persen, mampu membaca dan menulis huruf lainnya sebesar 1,61 persen serta mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya sebesar 35,09

persen. Sementara itu, penduduk lansia di perdesaan yang mampu membaca dan menulis hanya sebesar 60,15 persen, yang terdiri dari mampu membaca dan menulis huruf latin saja sebesar 36,44 persen, mampu membaca dan menulis huruf lainnya sebesar 2,37 persen, serta mampu membaca dan menulis keduanya sebesar 21,35 persen.

Kesenjangan yang cukup tinggi dalam kemampuan membaca dan menulis terjadi pada penduduk lansia laki-laki dan perempuan. Proporsi penduduk lansia perempuan yang tidak dapat membaca dan menulis sebesar 38,99 persen atau lebih tinggi dua kali lipat lebih dibandingkan dengan proporsi lansia laki-laki yang hanya 19,01 persen. Kondisi serupa terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi dan menghapus buta aksara untuk penduduk lansia maupun pra lansia masih sangat diperlukan, khususnya untuk penduduk perempuan. Upaya tersebut diperlukan, terlebih dari sisi usia, usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki sehingga kemampuan membaca dan menulis tersebut diharapkan akan lebih memudahkan kehidupan yang dijalaninya.

Gambar 4.1.
Angka Buta Aksara/Huruf Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin,
2015-2019



Sumber: Susenas, 2015-2019

Gambar 4.2 menunjukkan angka buta aksara atau juga yang dikenal sebagai buta huruf penduduk lansia menurut jenis kelamin dari tahun 2015 hingga 2019. Dalam rentang waktu tersebut, angka buta huruf penduduk lansia mengalami perubahan yang cukup berfluktuasi. Banyak faktor yang memengaruhi perubahan angka buta aksara pada penduduk lansia. Salah satunya, kemampuan fisik dan non fisik seperti daya ingat penduduk lansia yang cenderung menurun membuat mereka yang semula telah lulus program KF atau pernah mengenyam pendidikan di masa mudanya kembali kehilangan kemampuan baca tulisnya.

Lampiran Tabel 4.2.3 menunjukkan bahwa proporsi lansia yang buta huruf antar kabupaten/kota sangat bervariasi antara 4,59 persen sampai 68,36 persen. Angka buta huruf lansia tertinggi dan di atas 50 persen secara berturut-turut terjadi di Kabupaten Sampang (68,36 persen), Kabupaten Bondowoso (59,97 persen), Kabupaten Situbondo (54,71 persen) dan Kabupaten Sumenep (54,01 persen). Sebaliknya, kabupaten/kota dengan persentase lansia yang buta huruf terendah dan kurang dari 10 persen secara berturut-turut adalah Kota Surabaya (4,59 persen), Kota Madiun (7,86 persen), Kota Mojokerto (8,58 persen), Kota Blitar (9,06 persen) dan Kabupaten Sidoarjo (9,31 persen).

4.3. Fasilitas Teknologi Informasi

Geroteknologi merupakan ilmu yang mempelajari kaum lansia dan hubungannya dengan perkembangan teknologi. Pendekatan ini merupakan ilmu terbaru yang menguraikan sejauh mana perkembangan teknologi bagi kaum lansia. Kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan peluang atau kesempatan bagi kaum lansia untuk mengembangkan dirinya. Geroteknologi sebenarnya merupakan ilmu praktis untuk memudahkan para penduduk lansia dalam menggunakan sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Penerapan teknologi bagi kaum lansia akan membantu mereka untuk dapat menjalankan masa

tuanya secara mandiri. Akses teknologi informasi yang dimiliki oleh penduduk lansia disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Akses Teknologi Informasi, 2019

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Akses Teknologi Informasi		
	Telepon Seluler (HP)	Komputer/ Laptop	Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)			
Laki-laki (L)	52,46	3,00	14,46
Perempuan (P)	35,50	0,81	7,95
L+P	43,58	1,85	11,05
Perdesaan (D)			
Laki-laki (L)	38,68	0,49	2,58
Perempuan (P)	23,28	0,12	0,92
L+P	30,26	0,29	1,67
K+D			
Laki-laki (L)	45,73	1,77	8,66
Perempuan (P)	29,24	0,46	4,35
L+P	36,91	1,07	6,35

Sumber: Susenas, 2019

Sarana teknologi informasi yang paling banyak diakses oleh penduduk lansia di Jawa Timur adalah telepon seluler (36,91 persen). Sementara itu, penduduk lansia yang mengakses internet baik melalui komputer/laptop, HP maupun media lainnya sebesar 6,35

persen, dan proporsi lansia yang menggunakan komputer/laptop sebesar 1,07 persen.

Penggunaan teknologi biasanya dipengaruhi tingkat pendidikan lansia. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk mengakses teknologi. Seperti telah diulas dalam bab sebelumnya bahwa penduduk lansia di perkotaan umumnya memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan penduduk lansia di perdesaan. Dengan demikian, kecenderungan penduduk lansia perkotaan menggunakan teknologi lebih tinggi daripada di perdesaan.

Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa proporsi penduduk lansia di perkotaan yang menggunakan telepon seluler mencapai hampir 1,5 lipat dibandingkan penduduk lansia di perdesaan. Begitu pula, penggunaan komputer/laptop dan internet oleh lansia di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Bahkan, proporsi penduduk lansia perkotaan yang menggunakan internet (11,05 persen) lebih dari 6 kali lipat dibandingkan penduduk lansia di perdesaan yang menggunakan internet

BAB 5

KESEHATAN

Ada sebuah pepatah “*Men sana incorpore sano*” yang berarti di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan bagian dari unsur kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan, yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif sosial dan ekonomis. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kualitas hidup yang baik akan didapat bila seseorang memiliki kesehatan yang prima, baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan lebih baik dan optimal bila dibandingkan dengan kesehatan orang yang sedang terganggu kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kualitas kehidupan setiap manusia.

Tingkat/derajat kesehatan penduduk merupakan salah satu cermin dari tingginya kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Hal ini dikarenakan manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh sebab itu, upaya untuk membangun kualitas SDM tetap menjadi perhatian penting dalam setiap program pembangunan pemerintah.

Dalam upaya membangun kualitas SDM yang andal, program pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam bidang kesehatan mencakup semua usia, termasuk penduduk lansia. Aspek kesehatan bagi penduduk lansia sangat penting karena pada umumnya daya tahan tubuh mereka berkurang sejalan dengan bertambahnya usia. Penurunan daya tahan tubuh penduduk lansia hingga tingkat tertentu dapat mengakibatkan menjadi rentan atau mudah terserang berbagai penyakit. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya dari semua pihak agar para penduduk lansia memiliki kesehatan yang

prima dalam rangka melanjutkan aktivitas kehidupannya. Agar penduduk lansia selalu memiliki kesehatan yang prima salah satunya adalah dengan meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan penduduk lansia.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan penduduk lansia dituangkan dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab VI Pasal 14 Ayat (1) tentang pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah berupa peningkatan: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lansia; b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dan pada Ayat (3) disebutkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu penelitian mengenai pelayanan kesehatan penduduk lansia adalah penelitian pelayanan kesehatan penduduk lansia di rumah sakit. Penelitian menyimpulkan bahwa rumah sakit memiliki kecenderungan memberikan perlindungan kepada lansia

dalam pemenuhan hak atas kesehatannya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala, seperti anggaran untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia masih menyatu dengan anggaran rumah sakit secara keseluruhan, kurangnya dukungan Pemerintah Daerah maupun DPRD (belum ada kebijakan yang dikeluarkan bagi perlindungan penduduk lansia di rumah sakit), belum adanya landasan yuridis (peraturan pemerintah), dan terbatasnya SDM staf pelayanan kesehatan penduduk lansia. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penduduk lansia dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan, dan perlunya anggaran khusus program penduduk lansia. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan khusus untuk penduduk lansia diantaranya adalah pos pelayanan terpadu (posyandu) lansia. Pelayanan kesehatan ini disediakan sebagai sarana pencegahan dan pengobatan agar penduduk lansia selalu terpantau kesehatannya. Posyandu lansia juga merupakan ajang komunikasi sesama penduduk lansia.

Berdasarkan ilmu kesehatan, semakin aktif seorang lansia maka akan semakin baik daya tahan fisik, pikiran, dan kebahagiaannya. Kondisi kesehatan penduduk lansia tidak hanya dipengaruhi pola kehidupan sekarang, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup semasa mudanya. Kondisi kesehatan seseorang pada saat sekarang ini merupakan hasil proses akumulasi yang terjadi

semenjak manusia dalam kandungan sampai sekarang. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai pola hidup sehat dari masa kecil, remaja, dewasa, hingga lansia, kondisi kesehatannya akan lebih baik dibandingkan dengan seorang lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat yang biasanya terlihat dari gangguan kesehatan yang dikeluhkannya.

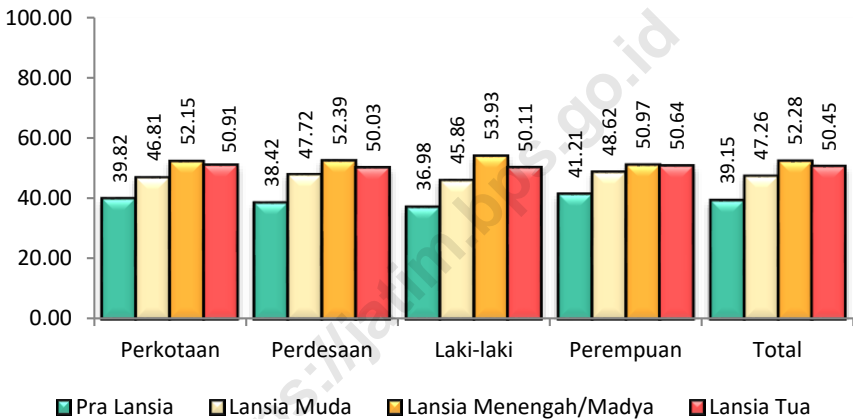
5.1. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala maupun karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminalitas atau keluhan lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara umum. Selain itu, keluhan kesehatan juga mencerminkan kondisi lingkungan tempat tinggal penduduk secara umum.

Penduduk lansia menurut kelompok usia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lansia muda (60-69 tahun), lansia menengah atau madya (70-79 tahun), dan lansia tua (80 tahun ke atas). Secara umum persentase penduduk pra lansia dan lansia yang mempunyai keluhan

keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1.
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2019



Sumber: Susenas, 2019

Dari gambar diatas terlihat bahwa semakin bertambahnya usia, persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan semakin besar. Penduduk pra lansia yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir sebanyak 39,15 persen. Sedangkan pada usia lansia muda ada sebanyak 47,26 persen yang mengalami keluhan kesehatan dan lebih dari 50 persen mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu pada masingmasing kelompok usia lansia madya dan tua. Pola yang sama juga terjadi pada

penduduk pra lansia dan lansia laki-laki maupun penduduk pra lansia dan lansia perempuan. Demikian pula pada kelompok pra lansia dan lansia di perkotaan maupun di perdesaan juga menunjukkan pola serupa.

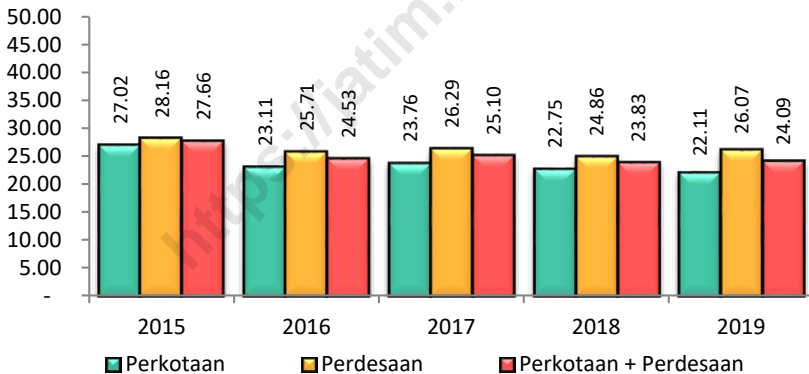
Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk perempuan pada kelompok pra lansia dan lansia muda relatif lebih banyak mengeluhkan kesehatannya dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki pada kelompok usia yang sama. Sebaliknya, pada kelompok lansia madya, justru menunjukkan bahwa lansia laki-laki lebih sering mengeluhkan kesehatannya dibanding lansia perempuan.

Pada Lampiran Tabel 5.1, terlihat bahwa hampir separuh lansia di Jawa Timur mengalami keluhan kesehatan. Bahkan, terdapat beberapa kabupaten/kota dengan persentase keluhan kesehatan lansianya diatas 60 persen, yaitu Kabupaten Sampang (69,46 persen), Kabupaten Pamekasan (62,00 persen), dan Kabupaten Blitar (61,63 persen). Sebaliknya, terdapat beberapa kabupaten/kota dengan persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan terendah dan dibawah 40 persen yaitu Kabupaten Sumenep (30,48 persen), Kabupaten Bangkalan (37,50 persen), Kabupaten Kediri (38,95 persen), dan Kabupaten Tulungagung (39,89 persen).

5.2. Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*) Lansia

Seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan dapat mengganggu aktifitas sehari-hari yaitu tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya. Kondisi ini sangat mungkin dialami penduduk lansia yang daya tahan tubuhnya menurun sehingga rentan terhadap penyakit.

Gambar 5.2.
Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, 2015-2019



Sumber: Susenas, 2015-2019

Angka morbiditas (*morbidity rates*) lansia adalah proporsi penduduk lansia yang mengalami masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari mereka selama sebulan terakhir. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan. Semakin rendah

angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang baik. Pada Tahun 2019, terjadi peningkatan derajat kesehatan di wilayah perkotaan dimana angka kesakitannya mengalami penurunan dari 22,75 persen di Tahun 2018 menjadi 22,11 persen di Tahun 2019. Namun hal ini tidak terjadi perdesaan yang angka kesakitannya malah semakin naik di Tahun 2019.

Tabel 5.1.
Angka Kesakitan Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Usia, 2019

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Kelompok Usia				
	Pra Lansia 45-59	Lansia Muda 60-69	Lansia Madya 70-79	Lansia tua 80+	Lansia 60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	15,74	21,37	24,73	23,40	22,40
Perempuan (P)	15,49	20,59	23,16	25,19	21,84
L + P	15,61	20,98	23,86	24,50	22,11
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	15,51	23,74	33,76	22,71	26,45
Perempuan (P)	17,57	24,09	25,72	34,37	25,76
L + P	16,59	23,92	29,22	30,49	26,07
K + D					
Laki-laki (L)	15,63	22,52	29,27	23,07	24,38
Perempuan (P)	16,50	22,37	24,47	30,09	23,85
L + P	16,08	22,44	26,58	27,58	24,09

Sumber: Susenas, 2019

Pada tahun 2019, angka kesakitan lansia sebesar 24,09 persen, artinya bahwa terdapat sekitar 24 orang dari setiap 100 orang lansia yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berdasarkan tipe daerah, derajat kesehatan lansia yang tinggal di perkotaan cenderung lebih baik daripada lansia yang tinggal di perdesaan. Hal ini terlihat dari angka kesakitan lansia di perkotaan (22,11 persen) yang lebih rendah daripada angka kesakitan lansia di perdesaan (26,07 persen). Kondisi ini terjadi pada hampir semua kelompok usia lansia baik pra lansia, lansia muda, lansia madya maupun lansia tua. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk lansia di perdesaan.

Tabel 5.1 juga menyajikan angka kesakitan lansia yang dibedakan menurut kelompok usia dan jenis kelamin. Bila dilihat menurut kelompok usia, seperti halnya pada pola lansia yang mengalami keluhan kesehatan bahwa semakin bertambah usia, lansia, maka persentase yang mengalami keluhan kesehatan semakin tinggi. Demikian pula halnya dengan angka kesakitan lansia, semakin bertambah usia, maka angka kesakitan lansia semakin tinggi. Sementara menurut jenis kelamin, semakin bertambah umur pada lansia perempuan maka semakin tinggi juga persentase yang mengalami keluhan kesehatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari mereka.

Pada Lampiran Tabel 5.2. dapat dilihat bahwa angka kesakitan penduduk lansia bervariasi antar kabupaten/kota di Jawa Timur dengan persentase berkisar antara 14,46 persen sampai 48,42 persen. Angka kesakitan penduduk lansia tertinggi dan diatas 30 persen terdapat di Kabupaten Sampang (48,42 persen), Kabupaten Pamekasan (32,67 persen), Kabupaten Nganjuk (31,83 persen), Kabupaten Situbondo (31,16 persen), dan Kabupaten Blitar (30,89 persen). Sedangkan persentase lansia yang mengalami sakit terendah berada di Kabupaten Sumenep (14,46 persen).

5.3. Cara Berobat

Tindakan seseorang untuk mencari berbagai cara pengobatan dalam upaya penyembuhan mencerminkan orang tersebut peduli akan kesehatannya. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kesehatan, baik oleh seseorang yang menderita sakit itu sendiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan maupun rawat jalan.

Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya,

Tabel 5.2.
Persentase Penduduk Lansia Dengan Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Cara Berobat, 2019

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Persentase Lansia Dengan Keluhan Kesehatan	Cara Berobat				Total
		Tidak Berobat	Berobat Sendiri saja	Berobat Jalan saja	Berobat Sendiri dan Berobat Jalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	48,15	2,76	41,59	25,13	30,52	100,00
Perempuan (P)	49,16	2,91	37,62	28,37	31,10	100,00
L + P	48,68	2,84	39,49	26,84	30,83	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	48,53	3,40	39,77	22,98	33,85	100,00
Perempuan (P)	49,91	2,85	41,91	23,77	31,47	100,00
L + P	49,29	3,10	40,95	23,41	32,54	100,00
K + D						
Laki-laki (L)	48,33	3,07	40,70	24,07	32,16	100,00
Perempuan (P)	49,55	2,88	39,83	26,00	31,29	100,00
L + P	48,98	2,97	40,23	25,11	31,69	100,00

Sumber: Susenas, 2019

dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Berdasarkan data Susenas 2019, hampir separuh lansia di Jawa Timur mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Dari total lansia dengan keluhan kesehatan

tersebut, 40,23 persen diantaranya hanya berobat sendiri saja, namun ada sebagian kecil yang sama sekali tidak berupaya untuk mengobati keluhan kesehatannya (2,97 persen).

Tabel 5.3.
Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Menurut Kelompok Usia, Tipe Daerah dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2019

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Persentase lansia yang tidak berobat jalan	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan				Total
		Tidak Ada Biaya	Mengoba- ti Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	44,35	1,71	64,99	29,53	3,77	100,00
Perempuan (P)	40,53	2,07	60,95	32,57	4,42	100,00
L + P	42,33	1,89	62,94	31,07	4,10	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	43,17	2,42	60,05	33,03	4,51	100,00
Perempuan (P)	44,76	2,33	62,38	31,44	3,85	100,00
L + P	44,05	2,37	61,36	32,13	4,13	100,00
K + D						
Laki-laki (L)	43,77	2,05	62,60	31,22	4,13	100,00
Perempuan (P)	42,71	2,21	61,72	31,96	4,11	100,00
L + P	43,20	2,14	62,13	31,62	4,12	100,00

Sumber: Susenas, 2019

Tabel 5.3 di atas menunjukkan masih cukup banyak lansia yang mengalami keluhan kesehatan yang tidak berobat jalan. Lansia

dengan keluhan kesehatan yang tidak berobat jalan sebesar 43,20 persen. Dari total penduduk lansia dengan keluhan kesehatan tapi tidak berobat jalan tersebut, sebagian besar beralasan bahwa mereka sudah mengobati sendiri keluhan kesehatannya (62,13 persen) dan 31,62 persen yang lain beralasan merasa tidak perlu berobat jalan. Pola yang serupa terjadi pada lansia baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

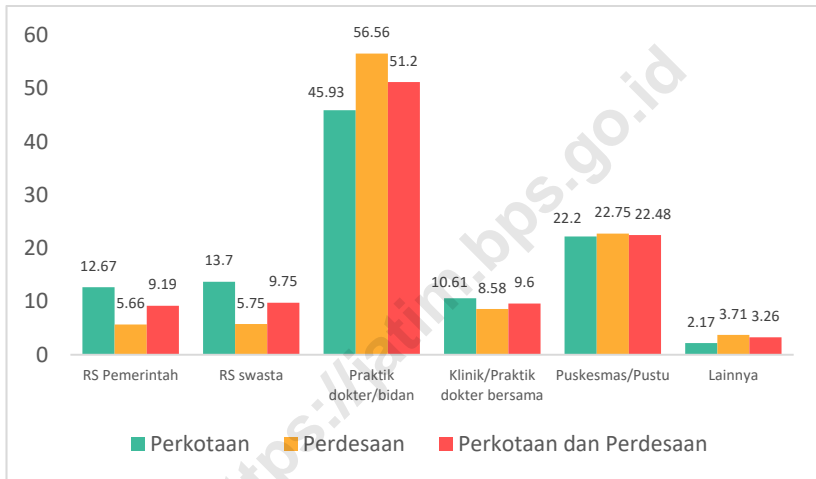
Penduduk lansia yang tidak berobat jalan dengan alasan tidak ada biaya sebanyak 2,14 persen dari total penduduk lansia yang mengalami kesehatan tapi tidak berobat jalan. Alasan tidak ada biaya dalam hal ini baik ketiadaan biaya berobat maupun ketiadaan biaya transportasi menuju tempat berobat. Alasan ketiadaan biaya lebih banyak ditemukan di wilayah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan antara perdesaan dan perkotaan belum terlalu merata seperti di perkotaan baik secara jarak, kualitas, dan biaya yang murah. Pemerintah perlu terus meningkatkan fasilitas kesehatan di wilayah perdesaan dengan berbagai cara. Jarak yang dekat dan modernisasi fasilitas akan memudahkan jangkauan masyarakat perdesaan untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang disarankan, tidak malah berobat ke pihak yang tidak lazim seperti dukun dan lain-lain yang mungkin malah akan memperburuk kondisi kesehatannya.

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Probolinggo merupakan kabupaten/kota dengan persentase penduduk lansia dengan keluhan kesehatan yang tidak berobat jalan tertinggi dengan diatas 55 persen. Sebaliknya, Kota Batu satu-satunya kabupaten/kota dengan persentase lansia tidak berobat jalan terendah, yaitu sebesar 30,75 persen. Kondisi penduduk lansia yang tidak berobat jalan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran publikasi Tabel 5.4.1 – Tabel 5.4.3.

Berobat jalan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap. Dalam hal ini berobat jalan juga termasuk mendatangkan petugas kesehatan. Pada Gambar 5.3, terlihat dua besar tempat yang paling banyak didatangi oleh penduduk lansia untuk berobat jalan yaitu praktik dokter/bidan (51,20 persen) dan puskesmas/pustu (22,48 persen). Dalam hal ini, satu orang penduduk lansia yang memiliki keluhan kesehatan bisa berobat jalan ke lebih dari satu tempat layanan kesehatan. Pola yang serupa terjadi pada penduduk lansia di perkotaan dan perdesaan. Penduduk lansia yang berobat jalan ke rumah sakit baik itu rumah sakit pemerintah ataupun swasta masih lebih banyak di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Namun demikian, baik di perkotaan dan perdesaan, praktik dokter/bidan dan puskesmas/pustu menjadi dua tempat layanan

kesehatan yang paling banyak didatangi lansia untuk berobat jalan saat memiliki keluhan kesehatan.

Gambar 5.3.
Persentase Penduduk Lansia dengan Keluhan Kesehatan Menurut Tempat Berobat Jalan dan Tipe Daerah, 2019



Sumber: Susenas, 2019

Keterangan :

*Lainnya termasuk UKBM = Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) dan Praktek Batra (Pengobatan Tradisional) termasuk dukun bersalin

Pada Gambar 5.3 juga terlihat bahwa pilihan penduduk lansia mendatangi klinik praktek/dokter sebagai pilihan utama untuk berobat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Praktek dokter/bidan dianggap sebagai tempat berobat jalan yang praktis dan fleksibel secara waktu untuk mendatanginya. Hal ini yang menyebabkan sebagian besar penduduk lansia lebih memilih untuk berobat di praktek dokter/bidan. Selain itu, Puskesmas/Pustu

menjadi pilihan alternatif lansia untuk berobat jalan karena keberadaannya di setiap kecamatan yang relatif mudah diakses dengan biaya terjangkau.

Dikaji berdasarkan kabupaten/kota, data dari lampiran Tabel 5.5.3 menunjukkan bahwa terdapat lima kabupaten/kota yang persentase pemanfaatan puskesmas/puskesmas pembantu tertinggi sebagai tempat utama berobat jalan, yaitu Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Blitar dan Kota Madiun. Sementara itu, persentase berobat jalan lansia tertinggi di rumah sakit swasta berada di Kota Malang sedangkan Kota Madiun menjadi kabupaten/kota dengan persentase terbesar lansia yang berobat jalan di rumah sakit pemerintah.

BAB 6

KETENAGAKERJAAN

Penduduk lansia yang terlibat aktif dalam ketenagakerjaan merupakan penduduk lansia potensial yaitu penduduk lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Lansia potensial ini mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, secara normatif penduduk lansia merupakan kelompok penduduk yang semestinya tinggal menikmati masa tua tanpa harus bekerja. Kenyataannya masih banyak dijumpai lansia yang bekerja baik itu karena tuntutan hidup atau karena alasan lain.

Usaha pemberdayaan penduduk lansia merupakan salah satu usaha melatih kemandirian, baik dari aspek ekonomis, pemenuhan psikologi, sosial, budaya dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan

pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia. Bagi penduduk lansia produktif, hak mendapatkan kesempatan kerja juga tercantum pada UU tersebut Bab III Pasal 5 Ayat (2)c. Selanjutnya pada Bab VI Pasal 15 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memberi peluang bagi pendayagunaan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya yang dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

Agar kebijakan ketenagakerjaan penduduk lansia dapat lebih terarah, maka pada bagian ini akan disajikan gambaran secara makro khusus mengenai kegiatan ekonomi penduduk lansia. Selain itu disajikan pula mengenai indikator ketenagakerjaan lansia yang mencakup partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan usaha, jumlah jam kerja dan besaran upah.

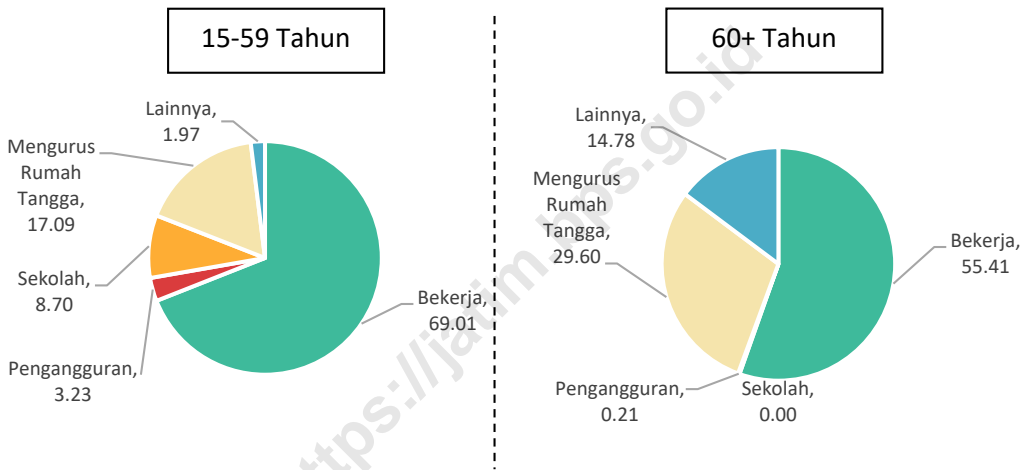
6.1. Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk lansia yang bekerja dan mencari pekerjaan (penganggur) merupakan lansia potensial. Angkatan kerja lansia ini tergolong sebagai lansia yang produktif dan mandiri. Lansia potensial banyak ditemukan di negara berkembang dan negara-negara yang belum memiliki tunjangan sosial untuk hari tua. Mereka berusaha tetap bekerja dalam upaya memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Gambaran jenis kegiatan lansia Jawa Timur ditunjukkan pada Gambar 6.1 di bawah ini. Sakernas Agustus 2019 menunjukkan penduduk lansia di Jawa Timur yang bekerja sebesar 55,41 persen dan sebesar 0,21 persen menganggur. Tingginya persentase penduduk lansia yang bekerja tidak hanya dipandang bahwa mereka masih benar-benar mampu bekerja, namun juga bisa bermakna bahwa tingkat kesejahteraannya masih rendah sehingga di usia senja mereka terpaksa masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk lansia yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga sebesar 29,60 persen dan melakukan kegiatan lainnya sebesar 14,78 persen. Kegiatan lainnya yang dimaksud dalam hal ini adalah berbagai kegiatan selain kegiatan bekerja, mencari pekerjaan, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya mencakup kegiatan santai, rekreasi, olahraga, hiburan, kegiatan sosial dan kegiatan

keagamaan antara lain berupa kegiatan pengajian, atau kebaktian dan kegiatan kemasyarakatan.

Gambar 6.1
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Kelompok Usia, 2019

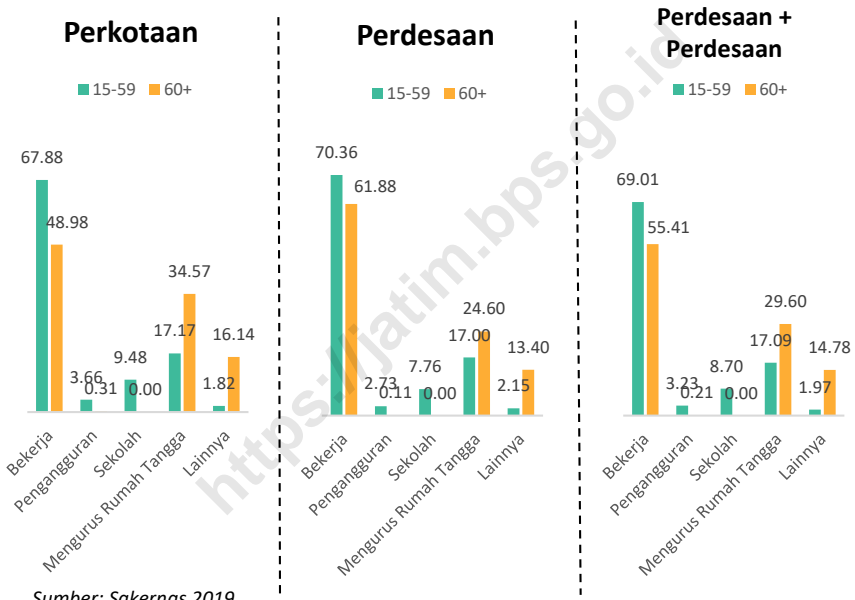


Sumber: Sakernas 2019

Persentase penduduk lansia yang bekerja lebih kecil dibandingkan persentase penduduk usia 15-59 tahun yang bekerja. Demikian juga dengan persentase penduduk lansia yang menganggur. Dari angka ini menjelaskan bahwa penduduk usia 15-59 tahun merupakan usia produktif, sebagian besar penduduk pada kelompok usia tersebut memiliki tanggung jawab lebih terhadap perekonomian keluarga. Sementara itu, untuk kegiatan mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya terlihat bahwa persentase

penduduk lansia lebih besar dibandingkan penduduk usia 15-59 tahun.

Gambar 6.2
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Tipe Daerah, 2019



Sumber: Sakernas 2019

Gambar 6.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk lansia di perdesaan yang bekerja lebih besar dibandingkan di perkotaan. Penduduk lansia di perdesaan yang bekerja sebesar 61,88 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 48,98 persen. Kondisi ini mungkin disebabkan karena penduduk lansia di perdesaan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan di perkotaan. Lapangan

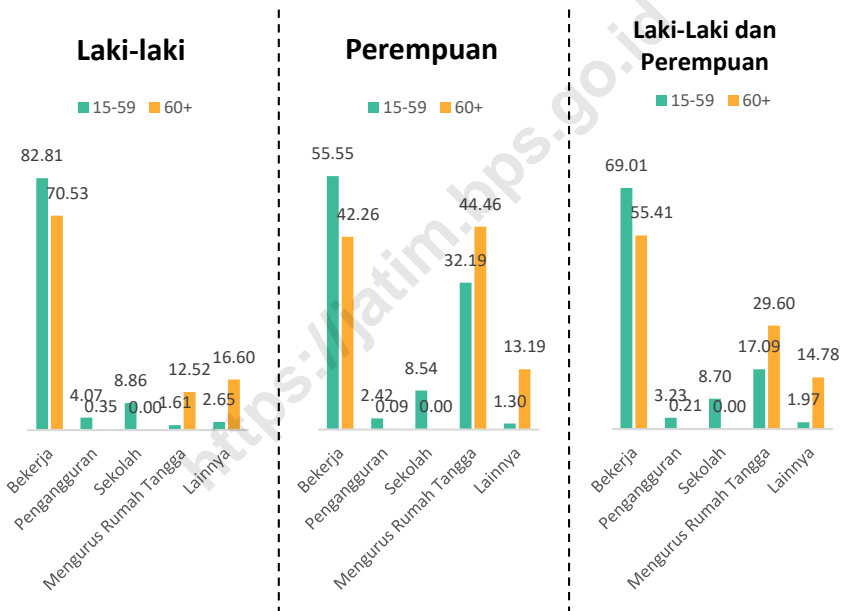
pekerjaan non formal lebih banyak tersedia di perdesaan, seperti sektor pertanian yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti faktor usia atau pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, persentase penduduk lansia di perkotaan dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga dan lainnya (34,57 persen dan 16,14 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (24,60 persen dan 13,40 persen).

Persentase penduduk lansia yang bekerja baik di perkotaan maupun di perdesaan lebih rendah apabila dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Perbedaan yang lebih nyata terlihat di daerah perkotaan. Penduduk 15-59 tahun di perkotaan yang bekerja (67,88 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lansia yang bekerja (48,98 persen).

Kegiatan utama dari penduduk lansia dan penduduk usia 15-59 tahun menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 6.3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa penduduk lansia laki-laki yang bekerja lebih besar dibanding perempuan. Penduduk lansia laki-laki yang bekerja sebesar 71,56 persen, sedangkan perempuan sebesar 41,96 persen. Sementara itu untuk kegiatan mengurus rumah tangga, persentase penduduk lansia perempuan (44,27 persen) jauh lebih tinggi dibanding lansia laki-laki (12,97 persen). Hal ini menunjukkan masih terdapat perbedaan peran antara lansia laki-laki dan perempuan dalam partisipasi kegiatan ekonomi. Perempuan

cenderung tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki cenderung bekerja. Pola yang sama juga terlihat pada kelompok usia produktif.

Gambar 6.3
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2019

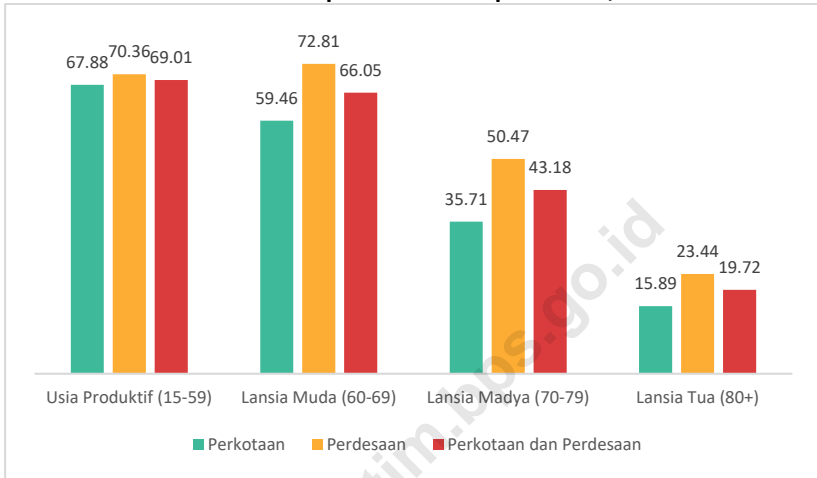


Sumber: Sakernas 2019

6.2. Karakteristik Lansia Bekerja

Produktivitas seseorang dalam melakukan aktivitas akan berbeda antara penduduk usia muda/produktif dengan penduduk lansia. Gambar 6.4 menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kelompok usia.

Gambar 6.4.
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Bekerja
Menurut Kelompok Usia dan Tipe Daerah, 2019

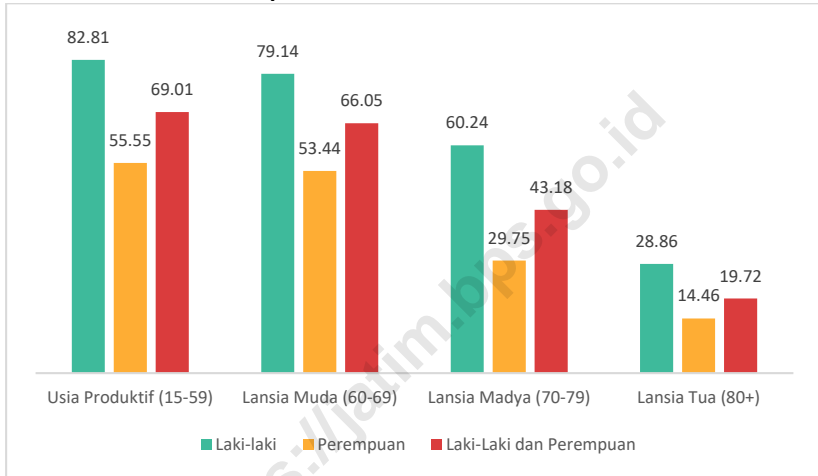


Sumber: Sakernas 2019

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa produktivitas akan cenderung berkurang seiring bertambahnya usia. Namun kondisi tersebut sedikit berbeda pada kategori lansia muda di perdesaan dimana persentase lansia muda yang bekerja lebih besar dibandingkan persentase penduduk usia produktif di desa yang bekerja. Pada gambar di atas juga terlihat bahwa pada penduduk lansia tua (80 tahun ke atas) yang bekerja (19,72 persen) mempunyai persentase terkecil diantara kelompok usia lansia lainnya. Persentase penduduk lansia madya (70-79 tahun) yang bekerja sebesar 43,18 persen dan lansia muda (60-69 tahun) yang bekerja sebesar 66,05 persen. Faktor kesehatan dan kondisi fisik mungkin menjadi

penyebab utama kecilnya penduduk lansia pada usia 80 tahun ke atas yang bekerja.

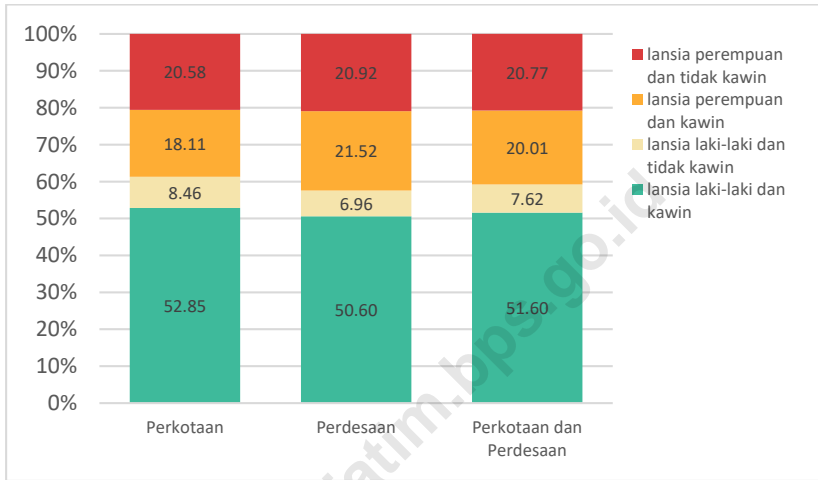
Gambar 6.5.
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut
Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2019



Sumber: Sakernas 2019

Persentase penduduk lansia yang bekerja di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, baik pada kelompok lansia muda, lansia madya, maupun lansia tua. Sedangkan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pada persentase penduduk lansia laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibandingkan perempuan pada setiap kelompok usia (Gambar 6.5).

Gambar 6.6.
Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2019



Sumber: Sakernas 2019

Dari total penduduk lansia yang bekerja, 71,61 persen diantaranya berstatus saat ini kawin. Lebih dari separuh penduduk lansia yang bekerja adalah lansia laki-laki berstatus kawin. Dari setiap 100 penduduk lansia yang bekerja 51-52 orang diantaranya adalah penduduk lansia laki-laki berstatus kawin. Pola yang serupa terlihat pada penduduk lansia di perkotaan dan perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa alasan umum penduduk lansia yang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Persentase penduduk lansia perempuan berstatus tidak kawin yang bekerja juga cukup besar, yaitu 20-21 orang dari setiap 100 penduduk lansia.

Tidak sedikit penduduk lansia yang masih menghidupi keluarga yang tinggal bersamanya. Penduduk lansia yang masih bekerja dan berstatus sebagai kepala rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status dalam Rumah Tangga, 2019

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status dalam Rumah Tangga				Total
	Kepala rumah tangga	Istri/ suami	Orang tua/ mertua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	96,44	0,26	2,38	0,92	100,00
Perempuan (P)	44,95	42,82	10,05	2,18	100,00
L + P	76,52	16,72	5,35	1,41	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	96,53	0,27	2,67	0,52	100,00
Perempuan (P)	39,69	46,68	12,14	1,49	100,00
L + P	72,41	19,97	6,69	0,93	100,00
K + D					
Laki-laki (L)	96,49	0,27	2,53	0,71	100,00
Perempuan (P)	41,90	45,06	11,26	1,78	100,00
L + P	74,23	18,53	6,09	1,14	100,00

Sumber: Sakernas 2019

Penduduk lansia yang bekerja dan berstatus sebagai kepala rumah tangga sebesar 74,23 persen, berstatus sebagai suami/istri

sebesar 18,53 persen, berstatus sebagai orang tua/mertua sebesar 6,09 persen, dan sebesar 1,14 persen berstatus lainnya. Pola yang sama terlihat di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Terdapat perbedaan status dalam rumah tangga di antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan yang bekerja. Mayoritas penduduk lansia laki-laki yang bekerja adalah mereka yang berstatus sebagai kepala rumah tangga dengan persentase sebesar 96,49 persen. Sementara itu, sebagian besar penduduk lansia perempuan yang bekerja adalah mereka yang berstatus sebagai istri dari kepala rumah tangga (45,06 persen) dan kepala rumah tangga (41,90 persen).

Tabel 6.2 menunjukkan persentase penduduk lansia yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Sebagian besar dari penduduk lansia yang bekerja adalah mereka yang mempunyai tingkat pendidikan rendah (17,40 persen tidak pernah sekolah, 35,16 persen tidak tamat SD, dan 33,30 persen berpendidikan SD/ sederajat). Sementara itu, persentase penduduk lansia bekerja yang mempunyai tingkat pendidikan perguruan tinggi hanya sebesar 2,69 persen.

Tabel 6.2.
Persentase Penduduk Lansia Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Total
	Tidak pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	Perguruan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan (K)							
Laki-laki	7,74	28,58	38,09	10,77	9,71	5,12	100,00
Perempuan	14,99	39,18	28,29	8,18	6,43	2,93	100,00
L+P	10,55	32,68	34,30	9,77	8,44	4,27	100,00
Perdesaan (D)							
Laki-laki (L)	16,92	34,95	37,81	5,48	2,98	1,86	100,00
Perempuan (P)	30,91	40,11	25,32	2,14	0,67	0,83	100,00
L + P	22,86	37,14	32,51	4,06	2,00	1,42	100,00
K + D							
Laki-laki (L)	12,71	32,02	37,94	7,91	6,07	3,35	100,00
Perempuan (P)	24,21	39,72	26,57	4,68	3,10	1,71	100,00
L + P	17,40	35,16	33,30	6,59	4,86	2,69	100,00

Sumber: Sakernas 2019

Penduduk lansia yang mempunyai pendidikan tinggi umumnya adalah mereka yang dulunya pada saat usia produktif sudah mempunyai pekerjaan baik, sehingga pada masa tuanya tidak perlu lagi bekerja karena sudah mampu menghidupi dirinya sendiri atau keluarganya tanpa harus bekerja, bisa melalui keberadaan uang pensiun atau tabungan. Berbeda dengan penduduk lansia

berpendidikan rendah, yang biasanya bekerja hanya memenuhi kebutuhannya untuk saat ini saja tanpa memikirkan adanya jaminan hari tua. Kondisi tersebut menyebabkan saat mereka memasuki usia lanjut, penduduk lansia yang tidak memiliki tabungan tersebut harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

6.3. Lapangan Usaha

Struktur perekonomian dan potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja penduduk lansia tercermin dari distribusi penduduk lansia yang bekerja menurut lapangan usaha. Dalam publikasi data ketenagakerjaan yang disajikan oleh BPS umumnya mengelompokkan lapangan usaha menjadi 17 sektor. Akan tetapi dalam publikasi ini, lapangan usaha yang melibatkan penduduk lansia dikelompokkan menjadi tiga kelompok lapangan usaha utama di Jawa Timur, yaitu sektor pertanian; manufaktur; dan jasa.

Tabel 6.3.
Persentase Penduduk Bekerja menurut Kelompok Usia, Tipe Daerah,
dan Lapangan Usaha, 2019

Kelompok Usia/ Tipe Daerah	Lapangan Usaha					Total
	Pertanian	Perdagangan	Industri Pengolahan	Konstruksi	Akomodasi dan Makan Minum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Usia Produktif (15-49 Tahun)						
Perkotaan	13,00	21,59	7,31	20,38	8,77	100,00
Perdesaan	42,70	15,06	8,49	13,35	5,03	100,00
Kota+Desa	26,83	18,55	7,86	17,11	7,03	100,00
Lansia (60+)						
Perkotaan	39,79	21,19	3,72	10,31	8,91	100,00
Perdesaan	72,68	9,59	2,24	6,69	3,10	100,00
Kota+Desa	58,09	14,73	2,90	8,30	5,68	100,00

Sumber: Sakernas, 2019

Sebagian besar penduduk lansia bekerja di sektor pertanian (58,09 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam ketenagakerjaan lansia. Penduduk lansia di Jawa Timur masih menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan lansia di Jawa Timur yang secara umum masih rendah berhubungan dengan tingginya persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian terbuka untuk semua kalangan dan tanpa syarat pendidikan maupun keterampilan tertentu. Terlebih di perdesaan, sektor pertanian menyerap hampir tiga per empat dari total lansia bekerja di daerah tersebut. Selain pertanian,

lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja lansia adalah sektor perdagangan (14,73 persen).

Tabel 6.4.
Persentase Penduduk Bekerja menurut Kelompok Usia, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha, 2019

Kelompok Usia/ Tipe Daerah	Lapangan Usaha					
	Pertanian	Perdagangan	Industri Pengolahan	Konstruksi	Akomodasi dan Makan Minum	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-59 tahun						
Tidak punya ijazah SD	24,87	7,02	9,49	7,39	9,18	4,79
SD sederajat	41,88	21,57	35,58	22,05	24,58	12,62
SMP sederajat	19,51	23,21	30,45	21,32	25,87	12,59
SMA ke atas	13,74	48,19	24,49	49,23	40,37	70,01
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lansia						
Tidak punya ijazah SD	59,66	49,37	33,77	42,10	43,37	40,43
SD sederajat	33,38	33,09	46,54	32,89	37,08	27,82
SMP sederajat	3,94	8,70	8,89	10,63	10,07	11,51
SMA ke atas	3,02	8,84	10,80	14,38	9,49	20,23
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas, 2019

Dari Tabel 6.4, terlihat bahwa pada penduduk lansia yang bekerja pada lapangan usaha pertanian 93,04 persen diantara merupakan lansia yang berpendidikan tamat SD ke bawah (Tamat SD sederajat 33,38 persen dan tidak punya ijazah SD sebesar 59,66 persen). Sementara itu penduduk lansia yang bekerja di sektor pertanian dan berpendidikan SMA keatas hanya sebesar 3,02 persen.

6.4. Status Pekerjaan

Komposisi penduduk lansia yang bekerja menurut status pekerjaan memberikan gambaran tentang kedudukan lansia dalam pekerjaan. Kedudukan seseorang dalam pekerjaan mencerminkan seberapa besar peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, status seseorang dalam pekerjaannya dibedakan menjadi (1) berusaha sendiri, (2) berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, (3) berusaha sendiri dibantu buruh tetap/dibayar, (4) buruh/karyawan/pegawai, (5) pekerja bebas di pertanian, (6) pekerja bebas di non pertanian, dan (7) pekerja keluarga/tidak dibayar. Status pekerjaan juga mencerminkan kemandirian dan partisipasi seseorang dalam kegiatan ekonomi.

Persentase penduduk lansia bekerja dengan status berusaha/bekerja dibantu buruh sebesar 39,47 persen merupakan persentase tertinggi dibandingkan status pekerjaan lainnya. Sementara itu persentase penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerja bebas dan buruh/karyawan/pegawai masing-masing sebesar 13,03 persen dan 9,09 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, di perkotaan masih cukup banyak penduduk lansia yang bekerja sebagai buruh/karyawan (13,45 persen), sedangkan di perdesaan (5,61 persen).

Tabel 6.5.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah,
Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2019

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	27,51	41,00	14,36	12,87	4,26	100,00
Perempuan (P)	35,12	23,46	12,01	10,89	18,52	100,00
L + P	30,46	34,21	13,45	12,10	9,78	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	17,99	57,06	6,72	14,13	4,10	100,00
Perempuan (P)	24,42	25,48	4,10	13,29	32,72	100,00
L + P	20,72	43,66	5,61	13,77	16,25	100,00
K + D						
Laki-laki (L)	22,36	49,68	10,23	13,55	4,18	100,00
Perempuan (P)	28,92	24,63	7,43	12,28	26,74	100,00
L + P	25,04	39,47	9,09	13,03	13,38	100,00

Sumber: Sakernas, 2019

Stabilitas pekerjaan dan adanya jaminan pekerjaan menjadi salah satu indikator pekerjaan layak. Pekerjaan layak diindikasikan dengan pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan. Sebaliknya, pekerjaan berisiko (*precarious work*) adalah pekerjaan yang berjangka pendek dan tidak stabil. Menurut ILO (2011), pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non-pertanian mewakili pekerjaan berisiko di Indonesia. Persentase lansia yang terserap dalam *precarious work* yaitu pekerja bebas adalah 13,03 persen.

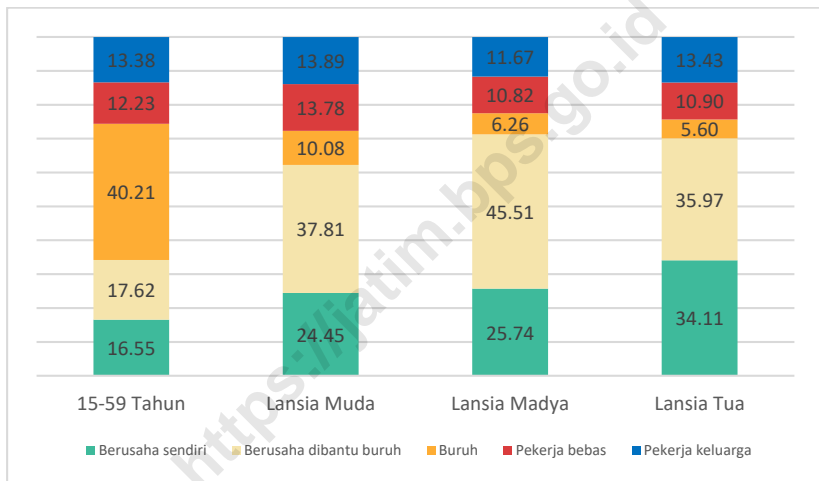
Ketidakstabilan pekerjaan ini menyebabkan upah yang diterima lansia tidak menentu yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan lansia.

Selain untuk menentukan *precarious work*, status pekerjaan juga dapat menentukan apakah lansia termasuk dalam *vulnerable employment*. Termasuk dalam *vulnerable employment* diantaranya adalah pekerja keluarga tidak dibayar dan berusaha sendiri serta pekerja bebas baik pertanian maupun nonpertanian. Status pekerjaan tersebut cenderung tidak formal, tidak memiliki jaminan sosial, dan lebih berisiko untuk bangkrut ketika keadaan ekonomi memburuk (UN, 2012). Persentase lansia yang termasuk dalam *vulnerable employment* di Jawa Timur sebesar 51,45 persen. Lansia dengan pekerjaan yang termasuk dalam *vulnerable employment* cenderung untuk jatuh dalam kemiskinan ketika permintaan menurun.

Bertambahnya usia penduduk lansia selaras dengan penambahan persentase penduduk lansia yang berusaha, baik berusaha sendiri maupun berusaha dibantu buruh (Gambar 6.7). Hal sebaliknya terjadi pada pekerja lansia dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai yang mengalami penurunan persentase seiring bertambahnya usia. Kondisi ini mencerminkan bahwa penduduk yang bekerja secara terikat pada suatu perusahaan

cenderung melepaskan statusnya sebagai buruh/karyawan/pegawai seiring dengan bertambahnya usia. Mereka cenderung beralih profesi sebagai pengusaha.

Gambar 6.7
Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Status Pekerjaan, 2019



Sumber: Sakernas, 2019

6.5. Jumlah Jam Kerja

Produktivitas seseorang dalam bekerja dapat dilihat melalui jumlah jam kerja yang ditekuninya. Bertambahnya usia menjadikan kondisi fisik lansia melemah sehingga jumlah jam kerja cenderung berkurang. Apabila lansia bekerja secara berlebihan, kondisi fisik dan mental lansia terancam dalam jangka panjang. Jam kerja berlebih juga akan menurunkan produktivitas pekerjaan (ILO, 2011). Menurut

ILO, jumlah jam kerja maksimal dalam seminggu adalah 48 jam. Apabila melebihi batas tersebut, maka pekerjaan dianggap tidak layak dari segi jam kerja. Namun demikian, dari Tabel 6.6. terlihat bahwa persentase penduduk lansia yang bekerja secara berlebihan atau jam kerja lebih dari 48 jam dalam seminggu terakhir masih cukup banyak.

Tabel 6.6.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2019

Kelompok Usia/ Jenis Kelamin	Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir					Jumlah
	0 jam	1 – 14 jam	15 – 34 jam	35 – 48 jam	49+ jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Tipe daerah						
Perkotaan (K)	3,70	12,28	29,46	27,40	27,16	100,00
Perdesaan (D)	2,59	14,18	35,79	25,41	22,03	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki (L)	3,11	9,79	31,03	28,80	27,27	100,00
Perempuan (P)	3,03	18,48	35,82	22,66	20,00	100,00
Total	3,08	13,33	32,98	26,29	24,31	100,00

Sumber: Sakernas, 2019

Penduduk lansia yang bekerja dengan jam kerja berlebihan atau lebih dari 48 jam dalam seminggu terakhir sebesar 24,31 persen. Dengan kata lain, sekitar 1 dari 4 lansia yang bekerja memiliki jam kerja yang tidak layak. Lansia yang bekerja secara berlebihan di

perkotaan lebih banyak (27,16 persen) dibandingkan dengan lansia yang berada di perdesaan (22,03 persen).

Lansia laki-laki yang bekerja melebihi batas maksimum jam kerja sebesar 27,27 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan yang bekerja melebihi batas jam kerja dalam bekerja seminggu yang lalu (20,00 persen). Hal ini dapat disebabkan lansia laki-laki tetap dituntut untuk bekerja demi memenuhi nafkah keluarga meskipun sampai melebihi batas waktu dalam bekerja. Kendati demikian, persentase tertinggi terdapat pada lansia yang bekerja 15-34 jam dalam seminggu sebesar 32,98 persen. Pola ini juga terjadi pada lansia di perkotaan dan perdesaan.

6.6. Upah/Pendapatan

Lebih dari separuh lansia masih berstatus bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak usia produktif yang masih bergantung kepada orang tua atau lansia. Dengan usia sudah lanjut mereka tetap dituntut untuk memperoleh pendapatan yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya juga sebagai pemenuhan biaya dalam menjaga kesehatannya yang sudah mulai lemah.

Tabel 6.7.
Persentase Penduduk Lansia Bekerja
Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Per Bulan, 2019

Kelompok Usia/ Jenis Kelamin	Upah/Gaji/Pendapatan				Jumlah
	Kurang dari 1 juta	1 juta – 1,99 juta	2 juta – 2,99 juta	3 juta keatas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe daerah					
Perkotaan (K)	70,98	16,17	6,34	6,51	100,00
Perdesaan (D)	83,66	10,94	3,69	1,71	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki (L)	73,96	14,31	6,57	5,16	100,00
Perempuan (P)	83,96	11,74	2,40	1,91	100,00
Total	78,04	13,26	4,87	3,84	100,00

Sumber: Sakernas, 2019

Dari Tabel 6.7 di atas, 78,04 persen lansia yang bekerja menerima upah atau pendapatan kurang dari satu juta rupiah per bulan. Rendahnya upah atau pendapatan ini disebabkan oleh karena sebagian besar lansia yang bekerja berpendidikan rendah. Berdasarkan tipe daerah, persentase lansia bekerja di perdesaan dengan upah atau pendapatan kurang dari satu juta rupiah per bulan lebih besar dibandingkan persentase di perkotaan. Selain itu, persentase lansia perempuan yang bekerja dengan upah atau pendapatan kurang dari satu juta rupiah per bulan jauh lebih besar dibandingkan persentase lansia laki-laki yang upahnya kurang dari 1 juta. Lebih dari tiga perempat dari lansia perempuan bekerja

mendapatkan upah atau pendapatan kurang dari satu juta rupiah per bulan.

<https://jatim.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://jatim.bps.go.id>

Tabel 3.1.1.
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Usia, 2019

Kabupaten/Kota	<i>Laki-laki</i>				
	Pra Lansia		Lansia		
	45-54	55-59	60-69	70-74	75+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	15,32	7,09	11,03	3,53	4,06
02. Ponorogo	15,11	7,09	10,91	3,02	3,61
03. Trenggalek	14,98	6,66	9,94	2,91	3,46
04. Tulungagung	14,19	6,36	9,42	2,71	3,15
05. Blitar	14,34	6,71	9,69	2,89	3,70
06. Kediri	13,92	5,78	8,54	2,29	2,62
07. Malang	13,94	5,81	8,29	2,28	2,45
08. Lumajang	14,85	6,55	9,36	2,18	2,08
09. Jember	13,84	6,02	9,00	2,24	2,08
10. Banyuwangi	14,12	6,15	9,90	2,48	2,45
11. Bondowoso	14,96	6,41	9,97	2,50	1,95
12. Situbondo	14,96	6,50	9,27	2,13	1,67
13. Probolinggo	14,08	5,85	8,05	1,91	1,68
14. Pasuruan	13,75	5,20	6,24	1,44	1,22
15. Sidoarjo	13,29	4,62	5,09	1,23	1,08
16. Mojokerto	14,05	5,28	7,40	1,82	1,62
17. Jombang	13,84	5,43	7,78	2,06	2,09
18. Nganjuk	14,22	5,97	9,29	2,46	2,55
19. Madiun	15,84	7,37	10,37	2,79	3,24
20. Magetan	15,19	7,53	11,31	3,22	3,78
21. Ngawi	15,98	7,49	10,46	2,74	2,93
22. Bojonegoro	15,60	6,53	8,60	2,26	2,55
23. Tuban	14,71	6,16	7,60	1,89	2,04
24. Lamongan	15,37	6,72	8,69	2,25	2,18
25. Gresik	13,06	5,19	5,98	1,43	1,22
26. Bangkalan	12,14	4,78	7,16	2,06	2,00
27. Sampang	11,63	4,35	6,35	1,57	1,39
28. Pamekasan	12,41	4,94	6,48	1,39	1,48
29. Sumenep	15,33	6,41	8,95	2,01	1,71
71. Kota Kediri	13,43	5,32	6,82	1,65	1,70
72. Kota Blitar	13,63	5,92	7,87	2,08	2,34
73. Kota Malang	12,44	5,16	6,83	1,62	1,56
74. Kota Probolinggo	13,34	5,35	6,70	1,47	1,33
75. Kota Pasuruan	13,16	5,11	5,85	1,16	1,31
76. Kota Mojokerto	13,98	5,79	6,50	1,54	1,53
77. Kota Madiun	14,72	6,66	8,50	2,22	2,11
78. Kota Surabaya	12,73	5,05	6,15	1,33	1,16
79. Kota Batu	13,96	5,67	7,30	2,03	2,25
Jawa Timur	14,01	5,85	8,12	2,08	2,11

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Tabel 3.1.2.
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Usia, 2019

Kabupaten/Kota	Perempuan				
	Pra Lansia			Lansia	
	45-54	55-59	60-69	70-74	75+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	15,88	7,28	11,12	3,98	5,57
02. Ponorogo	15,94	7,66	10,82	3,57	5,41
03. Trenggalek	15,50	7,03	9,63	3,09	4,37
04. Tulungagung	14,51	6,70	8,69	2,82	4,07
05. Blitar	14,95	7,18	9,43	2,98	4,50
06. Kediri	14,58	6,25	8,33	2,57	3,71
07. Malang	14,42	6,07	8,46	2,60	3,41
08. Lumajang	15,41	6,88	9,17	2,49	2,99
09. Jember	14,05	6,19	8,79	2,55	2,99
10. Banyuwangi	14,66	6,48	9,70	2,75	3,39
11. Bondowoso	14,81	6,62	10,73	3,13	3,31
12. Situbondo	15,13	6,74	9,66	2,74	2,87
13. Probolinggo	14,04	6,00	8,25	2,46	2,85
14. Pasuruan	13,68	5,17	6,75	1,93	1,99
15. Sidoarjo	13,27	4,64	5,23	1,51	1,65
16. Mojokerto	14,22	5,55	7,49	2,14	2,39
17. Jombang	14,20	5,75	8,08	2,48	3,16
18. Nganjuk	14,70	6,37	9,30	2,76	3,65
19. Madiun	16,52	7,46	10,17	3,41	4,72
20. Magetan	16,26	7,98	11,13	4,02	5,92
21. Ngawi	16,23	7,51	10,37	3,23	4,14
22. Bojonegoro	15,29	6,40	8,46	2,85	3,82
23. Tuban	15,04	6,26	7,99	2,59	3,50
24. Lamongan	15,84	6,71	8,77	2,93	3,50
25. Gresik	13,38	5,19	6,40	1,84	2,02
26. Bangkalan	13,00	5,28	7,91	2,44	3,14
27. Sampang	12,37	4,84	6,89	1,91	2,15
28. Pamekasan	12,97	5,38	6,87	1,92	2,63
29. Sumenep	15,44	6,75	9,70	2,61	2,85
71. Kota Kediri	14,89	6,03	7,21	2,07	2,66
72. Kota Blitar	14,67	6,62	7,90	2,35	3,45
73. Kota Malang	13,53	5,75	6,89	1,88	2,55
74. Kota Probolinggo	13,87	5,48	6,82	1,81	2,45
75. Kota Pasuruan	13,88	5,40	5,95	1,66	2,32
76. Kota Mojokerto	14,90	6,10	7,04	2,00	2,54
77. Kota Madiun	15,66	7,36	9,12	2,72	3,79
78. Kota Surabaya	13,41	5,45	5,87	1,42	1,74
79. Kota Batu	14,29	5,61	7,21	2,11	3,16
Jawa Timur	14,42	6,12	8,20	2,46	3,13

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Tabel 3.1.3.
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Usia, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki + Perempuan				
	Pra Lansia			Lansia	
	45-54	55-59	60-69	70-74	75+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	15,61	7,18	11,08	3,76	4,83
02. Ponorogo	15,52	7,38	10,86	3,30	4,51
03. Trenggalek	15,24	6,85	9,79	3,00	3,92
04. Tulungagung	14,35	6,54	9,05	2,77	3,63
05. Blitar	14,65	6,95	9,56	2,94	4,10
06. Kediri	14,25	6,02	8,44	2,43	3,17
07. Malang	14,18	5,94	8,37	2,44	2,93
08. Lumajang	15,14	6,72	9,26	2,34	2,55
09. Jember	13,94	6,10	8,90	2,40	2,54
10. Banyuwangi	14,39	6,32	9,80	2,61	2,92
11. Bondowoso	14,88	6,52	10,36	2,82	2,65
12. Situbondo	15,05	6,63	9,47	2,45	2,28
13. Probolinggo	14,06	5,93	8,15	2,19	2,28
14. Pasuruan	13,71	5,18	6,50	1,69	1,61
15. Sidoarjo	13,28	4,63	5,16	1,37	1,37
16. Mojokerto	14,13	5,42	7,45	1,98	2,00
17. Jombang	14,02	5,59	7,93	2,27	2,63
18. Nganjuk	14,46	6,17	9,30	2,61	3,10
19. Madiun	16,19	7,42	10,27	3,11	3,99
20. Magetan	15,74	7,76	11,22	3,63	4,88
21. Ngawi	16,11	7,50	10,42	2,99	3,55
22. Bojonegoro	15,44	6,47	8,53	2,56	3,19
23. Tuban	14,88	6,21	7,80	2,24	2,78
24. Lamongan	15,62	6,72	8,73	2,60	2,86
25. Gresik	13,22	5,19	6,19	1,64	1,62
26. Bangkalan	12,59	5,04	7,55	2,26	2,60
27. Sampang	12,01	4,60	6,63	1,75	1,78
28. Pamekasan	12,70	5,17	6,68	1,66	2,07
29. Sumenep	15,39	6,59	9,34	2,32	2,31
71. Kota Kediri	14,16	5,68	7,02	1,86	2,19
72. Kota Blitar	14,15	6,28	7,89	2,22	2,90
73. Kota Malang	12,99	5,45	6,86	1,76	2,06
74. Kota Probolinggo	13,61	5,41	6,76	1,64	1,90
75. Kota Pasuruan	13,52	5,26	5,90	1,41	1,82
76. Kota Mojokerto	14,45	5,95	6,77	1,77	2,04
77. Kota Madiun	15,21	7,02	8,82	2,48	2,98
78. Kota Surabaya	13,08	5,25	6,01	1,38	1,45
79. Kota Batu	14,12	5,64	7,25	2,07	2,70
Jawa Timur	14,21	5,99	8,16	2,27	2,63

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Tabel 3.2.
Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	30,54	33,95	32,28
02. Ponorogo	28,00	32,21	30,09
03. Trenggalek	25,88	26,98	26,43
04. Tulungagung	24,74	24,59	24,66
05. Blitar	26,40	27,36	26,88
06. Kediri	21,23	23,19	22,20
07. Malang	20,23	22,82	21,51
08. Lumajang	21,35	22,65	22,02
09. Jember	21,08	22,55	21,83
10. Banyuwangi	23,68	25,25	24,47
11. Bondowoso	22,56	27,26	24,95
12. Situbondo	19,79	23,28	21,58
13. Probolinggo	17,98	20,99	19,52
14. Pasuruan	13,23	15,92	14,58
15. Sidoarjo	10,78	12,23	11,50
16. Mojokerto	16,39	18,24	17,31
17. Jombang	18,58	21,50	20,04
18. Nganjuk	22,65	25,00	23,83
19. Madiun	26,21	29,42	27,83
20. Magetan	29,78	34,78	32,33
21. Ngawi	25,58	28,18	26,91
22. Bojonegoro	20,63	23,37	22,01
23. Tuban	17,37	21,49	19,44
24. Lamongan	20,36	23,54	21,99
25. Gresik	12,95	15,40	14,18
26. Bangkalan	18,60	21,85	20,32
27. Sampang	15,03	17,40	16,26
28. Pamekasan	14,30	17,44	15,92
29. Sumenep	19,20	22,94	21,17
71. Kota Kediri	15,02	17,83	16,42
72. Kota Blitar	19,16	21,10	20,14
73. Kota Malang	14,50	16,39	15,45
74. Kota Probolinggo	14,45	16,90	15,69
75. Kota Pasuruan	12,60	14,96	13,79
76. Kota Mojokerto	14,34	17,37	15,88
77. Kota Madiun	19,58	24,02	21,86
78. Kota Surabaya	12,44	12,83	12,64
79. Kota Batu	17,54	19,13	18,33
Jawa Timur	18,98	21,28	20,14

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Tabel 3.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	18,62	20,67	19,67
02. Ponorogo	17,53	19,81	18,67
03. Trenggalek	16,32	17,09	16,71
04. Tulungagung	15,29	15,59	15,44
05. Blitar	16,28	16,91	16,59
06. Kediri	13,46	14,62	14,04
07. Malang	13,02	14,47	13,74
08. Lumajang	13,62	14,65	14,15
09. Jember	13,32	14,33	13,84
10. Banyuwangi	14,83	15,84	15,34
11. Bondowoso	14,41	17,18	15,83
12. Situbondo	13,07	15,27	14,20
13. Probolinggo	11,63	13,55	12,61
14. Pasuruan	8,90	10,67	9,79
15. Sidoarjo	7,40	8,40	7,89
16. Mojokerto	10,83	12,02	11,43
17. Jombang	11,93	13,72	12,83
18. Nganjuk	14,30	15,72	15,01
19. Madiun	16,40	18,31	17,37
20. Magetan	18,32	21,08	19,73
21. Ngawi	16,12	17,75	16,95
22. Bojonegoro	13,41	15,13	14,28
23. Tuban	11,54	14,08	12,82
24. Lamongan	13,12	15,21	14,19
25. Gresik	8,63	10,26	9,45
26. Bangkalan	11,22	13,49	12,40
27. Sampang	9,31	10,95	10,15
28. Pamekasan	9,35	11,42	10,42
29. Sumenep	12,66	15,16	13,97
71. Kota Kediri	10,17	11,94	11,06
72. Kota Blitar	12,30	13,71	13,01
73. Kota Malang	10,01	11,32	10,68
74. Kota Probolinggo	9,50	11,08	10,30
75. Kota Pasuruan	8,32	9,92	9,13
76. Kota Mojokerto	9,57	11,58	10,59
77. Kota Madiun	12,83	15,64	14,28
78. Kota Surabaya	8,64	9,04	8,84
79. Kota Batu	11,58	12,47	12,02
Jawa Timur	12,30	13,79	13,06

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Tabel 3.4.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2019

Kabupaten/Kota	<i>Laki-laki</i>				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	0,32	85,28	0,39	14,02	100,00
02. Ponorogo	1,18	83,80	0,91	14,10	100,00
03. Trenggalek	0,27	82,34	1,42	15,98	100,00
04. Tulungagung	-	83,16	0,94	15,90	100,00
05. Blitar	1,15	80,73	2,74	15,38	100,00
06. Kediri	1,27	76,85	3,34	18,54	100,00
07. Malang	0,29	85,94	2,76	11,01	100,00
08. Lumajang	0,93	82,89	0,38	15,79	100,00
09. Jember	1,12	83,54	2,74	12,61	100,00
10. Banyuwangi	1,24	83,00	2,57	13,18	100,00
11. Bondowoso	-	88,63	3,93	7,45	100,00
12. Situbondo	1,19	83,57	1,06	14,18	100,00
13. Probolinggo	-	84,94	1,44	13,62	100,00
14. Pasuruan	-	83,57	0,99	15,44	100,00
15. Sidoarjo	-	77,62	0,72	21,65	100,00
16. Mojokerto	0,75	83,14	0,65	15,46	100,00
17. Jombang	0,55	85,07	2,67	11,72	100,00
18. Nganjuk	1,06	72,93	1,67	24,34	100,00
19. Madiun	-	85,96	0,48	13,55	100,00
20. Magetan	-	79,90	0,75	19,35	100,00
21. Ngawi	0,18	86,48	0,96	12,38	100,00
22. Bojonegoro	-	82,70	-	17,30	100,00
23. Tuban	-	85,18	0,42	14,40	100,00
24. Lamongan	0,28	76,77	1,90	21,05	100,00
25. Gresik	0,35	80,43	-	19,22	100,00
26. Bangkalan	-	81,00	1,76	17,24	100,00
27. Sampang	1,34	75,51	4,05	19,09	100,00
28. Pamekasan	-	84,26	-	15,74	100,00
29. Sumenep	-	87,61	1,01	11,38	100,00
71. Kota Kediri	-	77,63	0,71	21,66	100,00
72. Kota Blitar	0,91	84,24	1,61	13,23	100,00
73. Kota Malang	3,62	77,23	0,81	18,35	100,00
74. Kota Probolinggo	0,70	69,07	2,05	28,19	100,00
75. Kota Pasuruan	0,54	81,44	2,49	15,53	100,00
76. Kota Mojokerto	1,25	85,19	-	13,56	100,00
77. Kota Madiun	0,54	73,28	1,82	24,36	100,00
78. Kota Surabaya	0,23	80,29	-	19,48	100,00
79. Kota Batu	-	78,64	1,57	19,78	100,00
Jawa Timur	0,56	82,17	1,55	15,72	100,00

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 3.4.2.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2019

Kabupaten/Kota	Perempuan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	0,85	49,57	2,36	47,22	100,00
02. Ponorogo	3,18	41,25	1,89	53,67	100,00
03. Trenggalek	-	44,14	1,46	54,41	100,00
04. Tulungagung	0,51	37,28	3,63	58,58	100,00
05. Blitar	0,42	43,67	2,11	53,80	100,00
06. Kediri	-	35,76	1,80	62,44	100,00
07. Malang	0,35	42,70	1,42	55,53	100,00
08. Lumajang	-	38,00	4,62	57,39	100,00
09. Jember	0,85	35,07	3,91	60,17	100,00
10. Banyuwangi	0,54	38,56	5,99	54,91	100,00
11. Bondowoso	-	35,86	4,15	60,00	100,00
12. Situbondo	-	34,18	3,72	62,10	100,00
13. Probolinggo	0,60	33,22	4,42	61,76	100,00
14. Pasuruan	2,17	37,63	3,02	57,18	100,00
15. Sidoarjo	1,38	35,22	4,19	59,21	100,00
16. Mojokerto	0,81	41,58	4,26	53,36	100,00
17. Jombang	-	40,74	2,21	57,05	100,00
18. Nganjuk	0,02	36,36	1,51	62,11	100,00
19. Madiun	0,32	40,09	1,69	57,89	100,00
20. Magetan	0,81	41,73	1,42	56,04	100,00
21. Ngawi	0,32	41,63	3,35	54,69	100,00
22. Bojonegoro	0,11	39,75	4,11	56,03	100,00
23. Tuban	0,64	35,55	3,88	59,94	100,00
24. Lamongan	0,89	34,52	1,97	62,63	100,00
25. Gresik	-	36,75	1,88	61,37	100,00
26. Bangkalan	2,85	37,39	2,18	57,57	100,00
27. Sampang	2,22	35,49	2,01	60,27	100,00
28. Pamekasan	1,01	37,58	1,97	59,44	100,00
29. Sumenep	0,45	38,68	0,73	60,15	100,00
71. Kota Kediri	2,65	34,05	1,99	61,32	100,00
72. Kota Blitar	2,06	38,68	3,76	55,50	100,00
73. Kota Malang	2,76	40,93	4,68	51,63	100,00
74. Kota Probolinggo	5,37	30,01	2,69	61,93	100,00
75. Kota Pasuruan	0,65	32,01	1,87	65,48	100,00
76. Kota Mojokerto	2,17	35,89	-	61,94	100,00
77. Kota Madiun	1,73	40,36	4,99	52,92	100,00
78. Kota Surabaya	2,75	43,84	3,00	50,41	100,00
79. Kota Batu	-	47,22	1,33	51,45	100,00
Jawa Timur	0,89	38,80	2,91	57,41	100,00

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 3.4.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki + Perempuan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	0,60	65,99	1,45	31,95	100,00
02. Ponorogo	2,25	61,18	1,43	35,14	100,00
03. Trenggalek	0,13	62,66	1,44	35,78	100,00
04. Tulungagung	0,26	59,39	2,34	38,01	100,00
05. Blitar	0,78	61,87	2,42	34,94	100,00
06. Kediri	0,61	55,51	2,54	41,34	100,00
07. Malang	0,32	63,27	2,06	34,35	100,00
08. Lumajang	0,44	59,09	2,63	37,85	100,00
09. Jember	0,98	57,99	3,36	37,68	100,00
10. Banyuwangi	0,88	59,96	4,34	34,81	100,00
11. Bondowoso	-	59,23	4,05	36,72	100,00
12. Situbondo	0,53	56,33	2,53	40,61	100,00
13. Probolinggo	0,33	56,47	3,08	40,12	100,00
14. Pasuruan	1,19	58,40	2,10	38,31	100,00
15. Sidoarjo	0,73	55,16	2,56	41,55	100,00
16. Mojokerto	0,78	61,23	2,55	35,44	100,00
17. Jombang	0,25	61,23	2,42	36,10	100,00
18. Nganjuk	0,51	53,67	1,59	44,23	100,00
19. Madiun	0,17	61,45	1,13	37,25	100,00
20. Magetan	0,44	58,97	1,11	39,47	100,00
21. Ngawi	0,26	62,48	2,24	35,02	100,00
22. Bojonegoro	0,06	59,66	2,21	38,07	100,00
23. Tuban	0,35	57,62	2,34	39,69	100,00
24. Lamongan	0,62	53,47	1,94	43,97	100,00
25. Gresik	0,16	56,38	1,03	42,43	100,00
26. Bangkalan	1,61	56,36	2,00	40,03	100,00
27. Sampang	1,83	53,38	2,92	41,87	100,00
28. Pamekasan	0,57	57,92	1,11	40,40	100,00
29. Sumenep	0,26	59,78	0,85	39,11	100,00
71. Kota Kediri	1,44	54,00	1,41	43,16	100,00
72. Kota Blitar	1,52	60,01	2,76	35,71	100,00
73. Kota Malang	3,16	57,71	2,89	36,25	100,00
74. Kota Probolinggo	3,23	47,95	2,40	46,42	100,00
75. Kota Pasuruan	0,60	54,33	2,14	42,93	100,00
76. Kota Mojokerto	1,76	57,79	-	40,45	100,00
77. Kota Madiun	1,22	54,66	3,61	40,51	100,00
78. Kota Surabaya	1,53	61,43	1,55	35,48	100,00
79. Kota Batu	-	62,82	1,45	35,73	100,00
Jawa Timur	0,74	58,96	2,28	38,03	100,00

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 3.5.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi
dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2019

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	89,56	-	9,31	1,13	100,00
02. Ponorogo	92,36	0,57	6,50	0,57	100,00
03. Trenggalek	87,38	1,06	9,59	1,96	100,00
04. Tulungagung	91,17	0,75	6,45	1,63	100,00
05. Blitar	93,23	0,99	3,53	2,25	100,00
06. Kediri	88,89	0,84	6,77	3,50	100,00
07. Malang	89,84	1,05	6,81	2,30	100,00
08. Lumajang	85,50	-	13,34	1,17	100,00
09. Jember	90,82	0,58	5,12	3,48	100,00
10. Banyuwangi	92,70	2,54	3,30	1,47	100,00
11. Bondowoso	91,77	0,85	6,76	0,62	100,00
12. Situbondo	88,34	-	10,47	1,19	100,00
13. Probolinggo	87,22	0,45	10,94	1,39	100,00
14. Pasuruan	90,75	3,53	4,47	1,24	100,00
15. Sidoarjo	94,22	-	5,78	-	100,00
16. Mojokerto	82,44	1,65	12,72	3,19	100,00
17. Jombang	89,26	0,53	7,99	2,22	100,00
18. Nganjuk	88,41	0,83	10,76	-	100,00
19. Madiun	90,63	0,53	7,50	1,34	100,00
20. Magetan	90,13	-	8,46	1,41	100,00
21. Ngawi	93,97	-	5,00	1,02	100,00
22. Bojonegoro	78,26	0,34	18,67	2,73	100,00
23. Tuban	90,71	0,61	7,23	1,45	100,00
24. Lamongan	83,06	0,53	15,03	1,38	100,00
25. Gresik	79,09	-	18,79	2,12	100,00
26. Bangkalan	93,92	-	6,07	0,01	100,00
27. Sampang	82,63	1,04	12,90	3,43	100,00
28. Pamekasan	92,40	0,00	7,45	0,15	100,00
29. Sumenep	92,04	0,77	5,34	1,84	100,00
71. Kota Kediri	83,97	0,67	14,91	0,45	100,00
72. Kota Blitar	90,81	3,71	4,57	0,91	100,00
73. Kota Malang	92,85	0,59	3,91	2,65	100,00
74. Kota Probolinggo	89,37	-	10,63	-	100,00
75. Kota Pasuruan	92,29	-	7,06	0,65	100,00
76. Kota Mojokerto	85,52	-	13,03	1,45	100,00
77. Kota Madiun	94,31	0,83	3,71	1,16	100,00
78. Kota Surabaya	89,56	2,32	7,35	0,77	100,00
79. Kota Batu	84,91	3,44	11,06	0,59	100,00
Jawa Timur	89,31	0,87	8,14	1,68	100,00

Sumber: Susenias, 2019.

Tabel 3.5.2.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi
dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2019

<i>Perempuan</i>					
Kabupaten/Kota	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	26,20	42,70	25,91	5,20	100,00
02. Ponorogo	29,31	35,52	28,21	6,97	100,00
03. Trenggalek	33,97	38,38	26,00	1,65	100,00
04. Tulungagung	38,77	33,81	25,86	1,55	100,00
05. Blitar	32,42	40,62	25,08	1,88	100,00
06. Kediri	39,27	32,49	25,24	3,00	100,00
07. Malang	29,57	38,63	26,96	4,84	100,00
08. Lumajang	31,12	34,95	30,13	3,79	100,00
09. Jember	32,65	33,26	29,98	4,11	100,00
10. Banyuwangi	31,27	35,90	25,55	7,28	100,00
11. Bondowoso	31,89	32,84	30,71	4,56	100,00
12. Situbondo	34,55	32,29	28,70	4,47	100,00
13. Probolinggo	25,54	28,72	40,87	4,87	100,00
14. Pasuruan	34,57	34,32	27,18	3,93	100,00
15. Sidoarjo	31,79	35,22	28,35	4,64	100,00
16. Mojokerto	33,13	33,25	30,23	3,39	100,00
17. Jombang	29,75	36,76	31,22	2,27	100,00
18. Nganjuk	36,65	33,95	28,35	1,06	100,00
19. Madiun	35,77	37,39	23,16	3,68	100,00
20. Magetan	27,14	38,57	29,93	4,35	100,00
21. Ngawi	40,78	39,74	16,05	3,43	100,00
22. Bojonegoro	23,66	31,41	41,50	3,44	100,00
23. Tuban	32,52	29,87	31,38	6,22	100,00
24. Lamongan	30,34	27,79	37,27	4,60	100,00
25. Gresik	25,13	30,29	41,69	2,89	100,00
26. Bangkalan	44,93	34,95	15,25	4,87	100,00
27. Sampang	36,32	27,54	30,92	5,22	100,00
28. Pamekasan	31,12	34,18	31,84	2,86	100,00
29. Sumenep	30,23	36,65	24,91	8,21	100,00
71. Kota Kediri	36,85	30,96	24,96	7,24	100,00
72. Kota Blitar	40,26	35,23	18,52	5,99	100,00
73. Kota Malang	35,06	38,86	18,80	7,28	100,00
74. Kota Probolinggo	30,71	30,00	32,45	6,84	100,00
75. Kota Pasuruan	46,29	28,43	24,65	0,63	100,00
76. Kota Mojokerto	39,04	31,05	24,67	5,24	100,00
77. Kota Madiun	32,39	38,59	24,39	4,63	100,00
78. Kota Surabaya	31,72	37,74	26,27	4,27	100,00
79. Kota Batu	22,85	37,51	36,72	2,92	100,00
Jawa Timur	32,37	34,83	28,52	4,28	100,00

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 3.5.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi
dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2019

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	55,33	23,07	18,27	3,33	100,00
02. Ponorogo	58,84	19,15	18,04	3,97	100,00
03. Trenggalek	59,86	20,29	18,05	1,80	100,00
04. Tulungagung	64,03	17,87	16,51	1,59	100,00
05. Blitar	62,28	21,16	14,50	2,06	100,00
06. Kediri	63,12	17,28	16,36	3,24	100,00
07. Malang	58,24	20,75	17,37	3,63	100,00
08. Lumajang	56,67	18,53	22,24	2,56	100,00
09. Jember	60,16	17,81	18,22	3,82	100,00
10. Banyuwangi	60,85	19,84	14,83	4,48	100,00
11. Bondowoso	58,42	18,67	20,10	2,82	100,00
12. Situbondo	58,67	17,81	20,52	3,00	100,00
13. Probolinggo	53,27	16,01	27,41	3,30	100,00
14. Pasuruan	59,97	20,40	16,92	2,72	100,00
15. Sidoarjo	61,14	18,66	17,74	2,46	100,00
16. Mojokerto	56,44	18,31	21,95	3,30	100,00
17. Jombang	57,26	20,01	20,48	2,25	100,00
18. Nganjuk	61,15	18,27	20,02	0,56	100,00
19. Madiun	61,31	20,23	15,87	2,59	100,00
20. Magetan	55,60	21,15	20,23	3,02	100,00
21. Ngawi	65,51	21,26	10,91	2,31	100,00
22. Bojonegoro	48,98	17,00	30,91	3,11	100,00
23. Tuban	58,39	16,86	20,64	4,10	100,00
24. Lamongan	53,99	15,56	27,29	3,16	100,00
25. Gresik	49,37	16,68	31,40	2,54	100,00
26. Bangkalan	66,24	19,75	11,26	2,75	100,00
27. Sampang	57,01	15,70	22,87	4,42	100,00
28. Pamekasan	57,81	19,29	21,21	1,68	100,00
29. Sumenep	56,89	21,18	16,47	5,47	100,00
71. Kota Kediri	58,42	17,09	20,36	4,13	100,00
72. Kota Blitar	63,92	20,48	11,99	3,61	100,00
73. Kota Malang	61,77	21,17	11,92	5,14	100,00
74. Kota Probolinggo	57,66	16,22	22,42	3,70	100,00
75. Kota Pasuruan	67,07	15,59	16,70	0,64	100,00
76. Kota Mojokerto	59,68	17,25	19,51	3,56	100,00
77. Kota Madiun	59,29	22,19	15,40	3,12	100,00
78. Kota Surabaya	59,63	20,65	17,14	2,58	100,00
79. Kota Batu	53,65	20,60	23,99	1,76	100,00
Jawa Timur	58,84	19,04	19,04	3,07	100,00

Sumber: Susenans, 2019.

Tabel 4.1.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Kabupaten/Kota	<i>Laki-laki</i>			Jumlah
	SD/ Sederajat ke Bawah	SLTP/ Sederajat	SMA/ Sederajat ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pacitan	84,28	4,98	10,74	100,00
02. Ponorogo	86,20	6,50	7,30	100,00
03. Trenggalek	85,68	6,28	8,04	100,00
04. Tulungagung	75,55	11,59	12,86	100,00
05. Blitar	82,51	7,91	9,58	100,00
06. Kediri	75,26	5,78	18,96	100,00
07. Malang	86,53	5,89	7,58	100,00
08. Lumajang	90,91	3,48	5,62	100,00
09. Jember	83,42	7,57	9,01	100,00
10. Banyuwangi	83,32	7,60	9,09	100,00
11. Bondowoso	87,86	4,78	7,36	100,00
12. Situbondo	82,15	8,09	9,76	100,00
13. Probolinggo	87,26	7,61	5,13	100,00
14. Pasuruan	73,10	8,40	18,51	100,00
15. Sidoarjo	65,51	14,03	20,45	100,00
16. Mojokerto	75,40	9,78	14,82	100,00
17. Jombang	73,26	16,34	10,40	100,00
18. Nganjuk	77,93	11,37	10,70	100,00
19. Madiun	85,48	8,85	5,67	100,00
20. Magetan	82,83	6,39	10,77	100,00
21. Ngawi	84,32	7,51	8,17	100,00
22. Bojonegoro	83,60	5,31	11,08	100,00
23. Tuban	90,78	5,96	3,25	100,00
24. Lamongan	86,66	5,96	7,38	100,00
25. Gresik	79,80	9,79	10,41	100,00
26. Bangkalan	84,85	5,02	10,12	100,00
27. Sampang	96,34	-	3,66	100,00
28. Pamekasan	88,42	3,64	7,94	100,00
29. Sumenep	94,11	4,96	0,93	100,00
71. Kota Kediri	55,57	18,78	25,65	100,00
72. Kota Blitar	50,39	14,54	35,07	100,00
73. Kota Malang	57,74	14,69	27,56	100,00
74. Kota Probolinggo	72,29	8,73	18,98	100,00
75. Kota Pasuruan	58,64	18,01	23,36	100,00
76. Kota Mojokerto	30,14	15,66	54,20	100,00
77. Kota Madiun	32,71	15,68	51,61	100,00
78. Kota Surabaya	60,67	13,97	25,36	100,00
79. Kota Batu	69,89	9,86	20,25	100,00
Jawa Timur	80,38	8,13	11,49	100,00

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 4.1.2.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Kabupaten/Kota	Perempuan			
	SD/ Sederajat ke Bawah	SLTP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pacitan	89,07	4,14	6,79	100,00
02. Ponorogo	95,23	1,90	2,87	100,00
03. Trenggalek	94,73	2,20	3,07	100,00
04. Tulungagung	93,42	3,80	2,78	100,00
05. Blitar	92,78	4,49	2,73	100,00
06. Kediri	86,87	6,27	6,86	100,00
07. Malang	93,88	3,38	2,74	100,00
08. Lumajang	96,47	-	3,53	100,00
09. Jember	89,79	6,30	3,91	100,00
10. Banyuwangi	91,93	6,38	1,69	100,00
11. Bondowoso	93,26	0,39	6,34	100,00
12. Situbondo	96,81	1,55	1,64	100,00
13. Probolinggo	95,45	3,94	0,60	100,00
14. Pasuruan	90,81	3,70	5,49	100,00
15. Sidoarjo	76,97	10,65	12,38	100,00
16. Mojokerto	89,93	7,35	2,72	100,00
17. Jombang	84,25	7,38	8,36	100,00
18. Nganjuk	93,12	4,70	2,18	100,00
19. Madiun	93,22	4,30	2,48	100,00
20. Magetan	87,97	5,99	6,04	100,00
21. Ngawi	93,32	3,90	2,78	100,00
22. Bojonegoro	93,22	1,42	5,36	100,00
23. Tuban	95,87	2,89	1,24	100,00
24. Lamongan	93,55	4,44	2,01	100,00
25. Gresik	90,14	6,36	3,50	100,00
26. Bangkalan	95,55	0,96	3,48	100,00
27. Sampang	98,58	-	1,42	100,00
28. Pamekasan	95,21	1,32	3,47	100,00
29. Sumenep	100,00	-	-	100,00
71. Kota Kediri	72,93	11,85	15,22	100,00
72. Kota Blitar	65,02	8,78	26,19	100,00
73. Kota Malang	70,24	17,70	12,06	100,00
74. Kota Probolinggo	77,37	11,11	11,52	100,00
75. Kota Pasuruan	78,30	11,53	10,17	100,00
76. Kota Mojokerto	56,42	17,21	26,36	100,00
77. Kota Madiun	52,17	14,22	33,61	100,00
78. Kota Surabaya	74,10	13,14	12,75	100,00
79. Kota Batu	84,02	5,97	10,02	100,00
Jawa Timur	90,22	4,98	4,80	100,00

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 4.1.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	SD/ Sederajat ke Bawah	SLTP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pacitan	86,87	4,53	8,60	100,00
02. Ponorogo	91,00	4,05	4,95	100,00
03. Trenggalek	90,34	4,18	5,48	100,00
04. Tulungagung	84,81	7,55	7,64	100,00
05. Blitar	87,74	6,17	6,09	100,00
06. Kediri	81,29	6,03	12,68	100,00
07. Malang	90,38	4,58	5,04	100,00
08. Lumajang	93,86	1,63	4,51	100,00
09. Jember	86,77	6,90	6,32	100,00
10. Banyuwangi	87,78	6,97	5,25	100,00
11. Bondowoso	90,87	2,34	6,79	100,00
12. Situbondo	90,24	4,48	5,28	100,00
13. Probolinggo	91,77	5,59	2,64	100,00
14. Pasuruan	82,80	5,83	11,37	100,00
15. Sidoarjo	71,58	12,24	16,18	100,00
16. Mojokerto	83,06	8,50	8,44	100,00
17. Jombang	79,17	11,52	9,30	100,00
18. Nganjuk	85,93	7,86	6,21	100,00
19. Madiun	89,62	6,42	3,97	100,00
20. Magetan	85,65	6,17	8,18	100,00
21. Ngawi	89,14	5,57	5,28	100,00
22. Bojonegoro	88,76	3,23	8,02	100,00
23. Tuban	93,61	4,26	2,13	100,00
24. Lamongan	90,46	5,12	4,42	100,00
25. Gresik	85,49	7,90	6,61	100,00
26. Bangkalan	90,90	2,73	6,37	100,00
27. Sampang	97,58	-	2,42	100,00
28. Pamekasan	92,25	2,33	5,42	100,00
29. Sumenep	97,46	2,14	0,40	100,00
71. Kota Kediri	64,98	15,02	19,99	100,00
72. Kota Blitar	58,17	11,48	30,35	100,00
73. Kota Malang	64,46	16,31	19,23	100,00
74. Kota Probolinggo	75,04	10,02	14,95	100,00
75. Kota Pasuruan	69,42	14,46	16,13	100,00
76. Kota Mojokerto	44,75	16,52	38,73	100,00
77. Kota Madiun	43,71	14,86	41,43	100,00
78. Kota Surabaya	67,62	13,54	18,84	100,00
79. Kota Batu	77,00	7,90	15,10	100,00
Jawa Timur	85,64	6,44	7,91	100,00

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 4.2.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2019

Kabupaten/Kota	Dapat Membaca & Menulis			Tidak Dapat Membaca & Menulis	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
	(1)	(2)	(3)		
01. Pacitan	55,97	0,29	28,59	15,15	100,00
02. Ponorogo	56,26	1,08	22,49	20,18	100,00
03. Trenggalek	47,45	-	40,79	11,76	100,00
04. Tulungagung	35,13	0,55	59,14	5,18	100,00
05. Blitar	54,53	-	33,16	12,31	100,00
06. Kediri	47,66	0,70	37,46	14,18	100,00
07. Malang	44,93	0,59	39,67	14,81	100,00
08. Lumajang	45,27	-	19,04	35,69	100,00
09. Jember	27,48	3,15	41,69	27,67	100,00
10. Banyuwangi	49,95	0,36	31,76	17,93	100,00
11. Bondowoso	32,54	1,04	18,72	47,71	100,00
12. Situbondo	32,60	3,27	23,93	40,20	100,00
13. Probolinggo	38,61	2,37	28,26	30,77	100,00
14. Pasuruan	37,47	1,38	41,16	19,99	100,00
15. Sidoarjo	40,36	-	55,93	3,70	100,00
16. Mojokerto	53,92	-	33,48	12,61	100,00
17. Jombang	47,71	-	40,11	12,19	100,00
18. Nganjuk	63,16	0,61	22,73	13,50	100,00
19. Madiun	55,24	-	22,62	22,14	100,00
20. Magetan	69,04	-	22,70	8,26	100,00
21. Ngawi	46,31	-	28,69	25,00	100,00
22. Bojonegoro	49,28	0,78	29,01	20,93	100,00
23. Tuban	42,12	1,54	32,41	23,93	100,00
24. Lamongan	52,01	0,36	31,50	16,13	100,00
25. Gresik	41,30	2,74	34,95	21,00	100,00
26. Bangkalan	14,94	11,66	46,29	27,10	100,00
27. Sampang	12,47	5,76	28,62	53,15	100,00
28. Pamekasan	7,13	8,97	51,11	32,79	100,00
29. Sumenep	22,74	7,19	36,41	33,66	100,00
71. Kota Kediri	57,51	-	36,85	5,64	100,00
72. Kota Blitar	45,98	-	50,98	3,04	100,00
73. Kota Malang	40,71	-	51,33	7,96	100,00
74. Kota Probolinggo	45,12	-	46,05	8,83	100,00
75. Kota Pasuruan	58,20	0,73	36,77	4,30	100,00
76. Kota Mojokerto	57,59	-	36,32	6,09	100,00
77. Kota Madiun	66,18	-	32,01	1,81	100,00
78. Kota Surabaya	59,29	-	38,19	2,52	100,00
79. Kota Batu	54,13	-	40,80	5,07	100,00
Jawa Timur	44,21	1,42	35,37	19,01	100,00

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 4.2.2.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2019

Kabupaten/Kota	Dapat Membaca & Menulis			Tidak Dapat Membaca & Menulis	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
	(2)	(3)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	52,93	-	23,32	23,74	100,00
02. Ponorogo	41,57	3,17	10,57	44,68	100,00
03. Trenggalek	43,51	0,51	24,06	31,92	100,00
04. Tulungagung	35,25	2,30	43,75	18,70	100,00
05. Blitar	46,53	1,45	22,85	29,17	100,00
06. Kediri	43,36	3,14	27,67	25,83	100,00
07. Malang	42,67	1,86	26,13	29,34	100,00
08. Lumajang	33,87	0,20	6,61	59,32	100,00
09. Jember	21,67	4,23	21,36	52,74	100,00
10. Banyuwangi	34,92	2,34	19,00	43,74	100,00
11. Bondowoso	20,66	1,90	7,72	69,73	100,00
12. Situbondo	21,43	0,55	11,50	66,52	100,00
13. Probolinggo	24,11	2,64	10,40	62,86	100,00
14. Pasuruan	34,07	5,12	28,56	32,24	100,00
15. Sidoarjo	40,92	1,29	43,50	14,29	100,00
16. Mojokerto	51,35	1,01	17,57	30,07	100,00
17. Jombang	43,80	0,52	31,05	24,64	100,00
18. Nganjuk	45,89	1,96	14,23	37,93	100,00
19. Madiun	40,45	0,85	12,96	45,74	100,00
20. Magetan	52,52	0,32	15,39	31,77	100,00
21. Ngawi	39,46	1,12	11,96	47,47	100,00
22. Bojonegoro	38,32	2,05	14,69	44,94	100,00
23. Tuban	26,70	2,63	14,44	56,23	100,00
24. Lamongan	34,06	0,48	24,02	41,45	100,00
25. Gresik	38,75	1,24	31,15	28,86	100,00
26. Bangkalan	9,54	16,40	20,75	53,31	100,00
27. Sampang	8,71	1,20	9,44	80,64	100,00
28. Pamekasan	5,37	12,19	25,02	57,42	100,00
29. Sumenep	10,33	5,28	14,95	69,45	100,00
71. Kota Kediri	58,37	-	25,99	15,65	100,00
72. Kota Blitar	41,95	-	43,69	14,37	100,00
73. Kota Malang	49,41	-	38,08	12,51	100,00
74. Kota Probolinggo	43,65	-	30,58	25,77	100,00
75. Kota Pasuruan	57,86	-	20,29	21,85	100,00
76. Kota Mojokerto	60,97	1,25	27,21	10,58	100,00
77. Kota Madiun	57,40	-	30,08	12,52	100,00
78. Kota Surabaya	60,26	1,96	31,26	6,53	100,00
79. Kota Batu	52,33	-	31,70	15,96	100,00
Jawa Timur	36,55	2,49	21,98	38,99	100,00

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 4.2.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2019

Kabupaten/Kota	Dapat Membaca & Menulis			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf	Huruf	Huruf Latin	Membaca &	
	Latin	Lainnya	& Lainnya	Menulis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	54,33	0,13	25,74	19,79	100,00
02. Ponorogo	48,45	2,19	16,15	33,20	100,00
03. Trenggalek	45,42	0,26	32,17	22,15	100,00
04. Tulungagung	35,19	1,46	51,17	12,18	100,00
05. Blitar	50,46	0,74	27,91	20,89	100,00
06. Kediri	45,43	1,96	32,38	20,23	100,00
07. Malang	43,74	1,26	32,57	22,43	100,00
08. Lumajang	39,23	0,10	12,45	48,22	100,00
09. Jember	24,42	3,72	30,97	40,89	100,00
10. Banyuwangi	42,15	1,38	25,15	31,32	100,00
11. Bondowoso	25,92	1,52	12,59	59,97	100,00
12. Situbondo	26,44	1,77	17,07	54,71	100,00
13. Probolinggo	30,63	2,51	18,43	48,43	100,00
14. Pasuruan	35,61	3,43	34,26	26,71	100,00
15. Sidoarjo	40,66	0,68	49,35	9,31	100,00
16. Mojokerto	52,56	0,53	25,09	21,81	100,00
17. Jombang	45,61	0,28	35,24	18,88	100,00
18. Nganjuk	54,06	1,32	18,25	26,36	100,00
19. Madiun	47,34	0,45	17,46	34,75	100,00
20. Magetan	59,98	0,17	18,69	21,15	100,00
21. Ngawi	42,64	0,60	19,74	37,02	100,00
22. Bojonegoro	43,40	1,47	21,33	33,80	100,00
23. Tuban	33,55	2,14	22,43	41,87	100,00
24. Lamongan	42,11	0,43	27,37	30,09	100,00
25. Gresik	39,90	1,91	32,86	25,33	100,00
26. Bangkalan	11,89	14,34	31,86	41,91	100,00
27. Sampang	10,39	3,24	18,01	68,36	100,00
28. Pamekasan	6,14	10,78	36,39	46,69	100,00
29. Sumenep	15,68	6,10	24,20	54,01	100,00
71. Kota Kediri	57,97	-	30,96	11,07	100,00
72. Kota Blitar	43,84	-	47,10	9,06	100,00
73. Kota Malang	45,39	-	44,21	10,41	100,00
74. Kota Probolinggo	44,33	-	37,69	17,99	100,00
75. Kota Pasuruan	58,01	0,33	27,74	13,93	100,00
76. Kota Mojokerto	59,47	0,69	31,26	8,58	100,00
77. Kota Madiun	61,21	-	30,92	7,86	100,00
78. Kota Surabaya	59,79	1,01	34,61	4,59	100,00
79. Kota Batu	53,23	-	36,21	10,56	100,00
Jawa Timur	40,11	1,99	28,20	29,70	100,00

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 5.1.
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	39,33	44,48	42,11
02. Ponorogo	50,86	49,72	50,25
03. Trenggalek	47,91	47,23	47,56
04. Tulungagung	39,62	40,15	39,89
05. Blitar	63,45	59,88	61,63
06. Kediri	43,92	52,50	48,38
07. Malang	43,98	47,02	45,57
08. Lumajang	39,60	48,00	44,06
09. Jember	46,38	49,15	47,84
10. Banyuwangi	50,85	55,17	53,09
11. Bondowoso	53,28	62,19	58,24
12. Situbondo	53,00	54,66	53,92
13. Probolinggo	60,38	58,09	59,12
14. Pasuruan	48,44	46,50	47,38
15. Sidoarjo	41,46	41,23	41,34
16. Mojokerto	55,12	55,61	55,38
17. Jombang	57,98	57,34	57,63
18. Nganjuk	49,76	48,81	49,26
19. Madiun	38,61	46,96	43,07
20. Magetan	48,87	47,28	48,00
21. Ngawi	48,20	47,05	47,58
22. Bojonegoro	59,25	50,81	54,72
23. Tuban	51,37	47,76	49,36
24. Lamongan	56,20	46,40	50,80
25. Gresik	45,05	39,30	41,88
26. Bangkalan	35,25	39,24	37,50
27. Sampang	69,10	69,75	69,46
28. Pamekasan	62,77	61,41	62,00
29. Sumenep	28,13	32,27	30,48
71. Kota Kediri	35,85	41,56	38,95
72. Kota Blitar	55,63	57,91	56,84
73. Kota Malang	38,57	48,25	43,78
74. Kota Probolinggo	46,52	48,66	47,68
75. Kota Pasuruan	56,57	58,36	57,55
76. Kota Mojokerto	51,97	65,12	59,28
77. Kota Madiun	55,47	54,50	54,92
78. Kota Surabaya	43,16	48,70	46,03
79. Kota Batu	45,58	47,03	46,31
Jawa Timur	48,33	49,55	48,98

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 5.2.
Angka Kesakitan Penduduk Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	17,22	20,31	18,89
02. Ponorogo	25,19	21,29	23,11
03. Trenggalek	23,22	23,71	23,47
04. Tulungagung	22,56	23,28	22,93
05. Blitar	33,74	28,15	30,89
06. Kediri	25,11	23,65	24,35
07. Malang	27,56	25,40	26,43
08. Lumajang	23,76	22,04	22,85
09. Jember	24,73	24,51	24,61
10. Banyuwangi	25,02	24,05	24,52
11. Bondowoso	27,43	27,92	27,70
12. Situbondo	30,75	31,50	31,16
13. Probolinggo	33,17	27,31	29,95
14. Pasuruan	26,95	18,93	22,55
15. Sidoarjo	15,73	13,54	14,57
16. Mojokerto	27,83	29,16	28,53
17. Jombang	23,39	28,93	26,37
18. Nganjuk	28,41	34,90	31,83
19. Madiun	17,16	20,16	18,76
20. Magetan	20,25	20,29	20,27
21. Ngawi	21,28	24,91	23,22
22. Bojonegoro	28,71	18,99	23,50
23. Tuban	20,08	18,85	19,40
24. Lamongan	25,68	22,30	23,82
25. Gresik	14,90	14,80	14,85
26. Bangkalan	15,55	17,46	16,62
27. Sampang	42,15	53,48	48,42
28. Pamekasan	38,77	27,96	32,67
29. Sumenep	16,60	12,84	14,46
71. Kota Kediri	15,08	19,69	17,58
72. Kota Blitar	25,55	28,52	27,13
73. Kota Malang	12,48	17,66	15,26
74. Kota Probolinggo	25,21	18,58	21,63
75. Kota Pasuruan	29,69	25,41	27,35
76. Kota Mojokerto	16,53	19,59	18,23
77. Kota Madiun	15,99	19,62	18,04
78. Kota Surabaya	20,61	27,64	24,25
79. Kota Batu	22,90	31,01	26,98
Jawa Timur	24,38	23,85	24,09

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 5.3.
Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	55,30	56,22	55,83
02. Ponorogo	57,11	52,11	54,48
03. Trenggalek	57,83	67,63	62,84
04. Tulungagung	49,21	71,58	60,88
05. Blitar	51,74	55,61	53,66
06. Kediri	64,19	62,53	63,26
07. Malang	59,71	56,27	57,85
08. Lumajang	46,30	47,03	46,72
09. Jember	61,66	42,22	51,14
10. Banyuwangi	57,94	51,44	54,44
11. Bondowoso	56,03	56,94	56,57
12. Situbondo	57,78	53,45	55,36
13. Probolinggo	43,24	43,96	43,63
14. Pasuruan	63,67	60,30	61,86
15. Sidoarjo	58,62	56,19	57,33
16. Mojokerto	60,51	51,73	55,86
17. Jombang	44,05	61,55	53,41
18. Nganjuk	55,45	63,98	59,90
19. Madiun	65,11	66,65	66,01
20. Magetan	51,39	56,84	54,33
21. Ngawi	50,08	61,40	56,07
22. Bojonegoro	63,64	56,99	60,33
23. Tuban	49,60	63,39	57,01
24. Lamongan	59,58	71,37	65,51
25. Gresik	58,97	61,31	60,18
26. Bangkalan	35,71	40,17	38,35
27. Sampang	67,73	69,42	68,67
28. Pamekasan	60,75	57,22	58,77
29. Sumenep	44,57	40,88	42,35
71. Kota Kediri	61,17	54,64	57,39
72. Kota Blitar	67,03	67,09	67,07
73. Kota Malang	53,17	61,45	58,08
74. Kota Probolinggo	69,80	62,00	65,50
75. Kota Pasuruan	63,61	64,07	63,87
76. Kota Mojokerto	64,17	64,89	64,61
77. Kota Madiun	58,85	70,65	65,47
78. Kota Surabaya	53,58	64,98	59,82
79. Kota Batu	58,41	79,61	69,25
Jawa Timur	56,23	57,29	56,80

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 5.4.1.
Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2019

Kabupaten/Kota	<i>Laki-laki</i>				Persentase Lansia yang Tidak Berobat Jalan
	Tidak Ada Biaya	Mengo-bati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	-	65,30	32,69	2,01	44,70
02. Ponorogo	-	65,16	31,08	3,75	42,89
03. Trenggalek	-	68,67	29,54	1,80	42,17
04. Tulungagung	-	63,70	36,30	-	50,79
05. Blitar	0,95	65,14	31,74	2,17	48,26
06. Kediri	-	87,03	12,97	-	35,81
07. Malang	11,92	48,21	30,34	9,53	40,29
08. Lumajang	2,05	71,03	23,17	3,76	53,70
09. Jember	1,58	74,68	19,65	4,10	38,34
10. Banyuwangi	1,77	77,71	15,17	5,35	42,06
11. Bondowoso	4,61	66,95	26,07	2,38	43,97
12. Situbondo	-	64,21	35,79	-	42,22
13. Probolinggo	2,72	44,20	51,64	1,45	56,76
14. Pasuruan	1,64	49,49	39,89	8,98	36,33
15. Sidoarjo	8,45	66,86	22,46	2,24	41,38
16. Mojokerto	7,31	45,75	35,72	11,23	39,49
17. Jombang	-	67,14	27,44	5,42	55,95
18. Nganjuk	-	59,86	38,76	1,39	44,55
19. Madiun	5,74	44,55	41,70	8,01	34,89
20. Magetan	-	73,08	26,92	-	48,61
21. Ngawi	0,29	61,29	37,01	1,40	49,92
22. Bojonegoro	-	86,15	5,79	8,06	36,36
23. Tuban	2,33	51,37	46,31	-	50,40
24. Lamongan	-	35,91	52,93	11,15	40,42
25. Gresik	-	39,25	55,75	5,00	41,03
26. Bangkalan	1,45	72,79	23,80	1,97	64,29
27. Sampang	1,63	55,22	43,15	-	32,27
28. Pamekasan	1,83	80,29	13,65	4,24	39,25
29. Sumenep	0,60	54,77	36,40	8,22	55,43
71. Kota Kediri	-	59,59	40,41	-	38,83
72. Kota Blitar	-	95,03	4,97	-	32,97
73. Kota Malang	4,71	65,80	29,49	-	46,83
74. Kota Probolinggo	-	84,89	15,11	-	30,20
75. Kota Pasuruan	-	74,00	16,60	9,40	36,39
76. Kota Mojokerto	-	94,90	5,10	-	35,83
77. Kota Madiun	-	66,41	33,59	-	41,15
78. Kota Surabaya	-	50,46	42,06	7,48	46,42
79. Kota Batu	-	76,42	17,91	5,67	41,59
Jawa Timur	2,05	62,60	31,22	4,13	43,77

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 5.4.2.

Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2019

Kabupaten/Kota	Tidak Ada Biaya	Mengo-bati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	Perempuan
					Persentase Lansia yang Tidak Berobat Jalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	-	34,93	61,01	4,06	43,78
02. Ponorogo	-	63,89	30,31	5,80	47,89
03. Trenggalek	-	60,64	37,32	2,04	32,37
04. Tulungagung	-	84,77	15,23	-	28,42
05. Blitar	3,39	48,91	39,07	8,64	44,39
06. Kediri	-	82,19	15,38	2,43	37,47
07. Malang	3,04	60,50	33,53	2,94	43,73
08. Lumajang	2,37	58,37	34,66	4,60	52,97
09. Jember	4,61	73,52	21,86	-	57,78
10. Banyuwangi	1,75	84,60	9,22	4,43	48,56
11. Bondowoso	2,73	60,03	33,00	4,23	43,06
12. Situbondo	1,51	68,53	22,08	7,88	46,55
13. Probolinggo	3,25	47,78	45,71	3,25	56,04
14. Pasuruan	1,29	40,86	50,51	7,35	39,70
15. Sidoarjo	9,00	45,19	41,99	3,82	43,81
16. Mojokerto	-	51,74	41,79	6,47	48,27
17. Jombang	-	54,70	29,54	15,75	38,45
18. Nganjuk	-	68,51	29,57	1,92	36,02
19. Madiun	3,70	57,15	23,88	15,27	33,35
20. Magetan	1,02	57,93	41,05	-	43,16
21. Ngawi	2,43	58,96	38,61	-	38,60
22. Bojonegoro	-	87,46	9,59	2,95	43,01
23. Tuban	5,57	52,90	39,31	2,22	36,61
24. Lamongan	-	47,64	46,18	6,18	28,63
25. Gresik	-	31,90	67,96	0,13	38,69
26. Bangkalan	1,84	52,72	42,36	3,08	59,83
27. Sampang	-	79,79	17,88	2,33	30,58
28. Pamekasan	2,19	71,79	20,27	5,75	42,78
29. Sumenep	1,75	47,19	49,04	2,02	59,12
71. Kota Kediri	-	56,06	38,41	5,53	45,36
72. Kota Blitar	-	85,43	9,07	5,50	32,91
73. Kota Malang	5,20	69,40	21,76	3,65	38,55
74. Kota Probolinggo	-	50,88	43,85	5,27	38,00
75. Kota Pasuruan	-	73,27	26,73	-	35,93
76. Kota Mojokerto	-	79,35	7,56	13,09	35,11
77. Kota Madiun	-	59,55	36,53	3,92	29,35
78. Kota Surabaya	5,21	58,41	33,30	3,08	35,02
79. Kota Batu	-	60,46	39,54	-	20,39
Jawa Timur	2,21	61,72	31,96	4,11	42,71

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 5.4.3.

Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki + Perempuan				Persentase Lansia yang Tidak Berobat Jalan
	Tidak Ada Biaya	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	-	48,13	48,70	3,17	44,17
02. Ponorogo	-	64,46	30,65	4,89	45,52
03. Trenggalek	-	65,09	33,01	1,90	37,16
04. Tulungagung	-	71,68	28,32	-	39,13
05. Blitar	2,11	57,45	35,21	5,23	46,34
06. Kediri	-	84,25	14,36	1,39	36,74
07. Malang	6,93	55,10	32,13	5,83	42,15
08. Lumajang	2,23	63,76	29,77	4,24	53,27
09. Jember	3,52	73,94	21,07	1,48	48,86
10. Banyuwangi	1,76	81,67	11,75	4,82	45,56
11. Bondowoso	3,50	62,87	30,16	3,47	43,43
12. Situbondo	0,88	66,73	27,80	4,59	44,64
13. Probolinggo	3,00	46,13	48,45	2,42	56,37
14. Pasuruan	1,44	44,66	45,83	8,07	38,14
15. Sidoarjo	8,75	55,10	33,06	3,10	42,67
16. Mojokerto	3,08	49,22	39,23	8,47	44,14
17. Jombang	-	61,65	28,37	9,98	46,59
18. Nganjuk	-	63,91	34,45	1,64	40,10
19. Madiun	4,57	51,75	31,51	12,16	33,99
20. Magetan	0,52	65,35	34,13	-	45,67
21. Ngawi	1,28	60,21	37,76	0,75	43,93
22. Bojonegoro	-	86,86	7,84	5,30	39,67
23. Tuban	3,81	52,07	43,10	1,01	42,99
24. Lamongan	-	40,82	50,11	9,07	34,49
25. Gresik	-	35,56	61,88	2,56	39,82
26. Bangkalan	1,67	61,28	34,44	2,61	61,65
27. Sampang	0,75	68,54	29,45	1,26	31,33
28. Pamekasan	2,04	75,36	17,49	5,11	41,23
29. Sumenep	1,31	50,09	44,21	4,39	57,65
71. Kota Kediri	-	57,42	39,18	3,41	42,61
72. Kota Blitar	-	89,83	7,19	2,98	32,94
73. Kota Malang	4,97	67,76	25,27	1,99	41,92
74. Kota Probolinggo	-	64,23	32,58	3,20	34,50
75. Kota Pasuruan	-	73,60	22,20	4,20	36,13
76. Kota Mojokerto	-	85,48	6,59	7,93	35,39
77. Kota Madiun	-	63,14	34,99	1,87	34,53
78. Kota Surabaya	2,49	54,26	37,88	5,38	40,18
79. Kota Batu	-	71,00	25,25	3,75	30,75
Jawa Timur	2,14	62,13	31,62	4,12	43,20

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 5.5.1.
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan, 2019

Kabupaten/Kota	<i>Laki-laki</i>							
	RS Peme-rintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktek Dokter Bersama	Puskes-mas/ Pustu	UKBM	Prak-tek Batra	Lain-nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Pacitan	7,91	7,71	55,67	12,23	11,70	6,89	1,15	1,81
02. Ponorogo	6,17	13,56	55,50	2,87	22,31	9,01	0,54	1,66
03. Trenggalek	12,93	3,72	40,50	16,77	21,95	6,96	-	7,66
04. Tulungagung	17,03	21,73	29,09	16,75	19,24	1,71	3,42	-
05. Blitar	10,40	10,89	52,81	12,97	12,04	4,26	2,55	3,34
06. Kediri	5,57	14,54	49,36	17,70	11,34	1,78	4,39	-
07. Malang	8,36	18,10	67,62	3,87	12,95	2,87	2,73	-
08. Lumajang	-	1,21	64,42	6,22	20,14	15,06	-	-
09. Jember	6,51	3,32	79,48	5,86	12,68	1,33	1,12	-
10. Banyuwangi	13,09	9,67	59,47	11,26	17,04	2,82	4,29	0,91
11. Bondowoso	-	7,60	67,71	1,06	20,23	10,28	1,14	2,07
12. Situbondo	22,76	2,51	53,70	12,30	16,45	1,36	2,68	2,65
13. Probolinggo	6,72	-	67,27	7,28	20,39	6,55	8,54	1,51
14. Pasuruan	9,74	22,42	33,68	11,14	18,20	2,12	4,08	1,14
15. Sidoarjo	17,42	15,18	23,12	34,76	40,59	2,47	-	-
16. Mojokerto	8,96	9,69	49,91	-	19,29	4,58	6,55	6,00
17. Jombang	17,46	11,23	39,26	20,01	25,86	-	3,68	-
18. Nganjuk	13,42	5,06	49,74	10,87	22,50	8,03	2,39	-
19. Madiun	28,94	0,92	37,48	7,70	30,10	1,64	2,97	6,01
20. Magetan	13,29	7,86	63,26	4,30	8,57	7,57	3,31	-
21. Ngawi	8,81	16,67	45,35	8,44	24,45	-	2,58	-
22. Bojonegoro	3,81	3,01	62,19	5,49	28,11	1,60	-	0,80
23. Tuban	1,69	2,48	70,89	12,68	15,99	-	3,20	4,06
24. Lamongan	7,46	5,02	54,02	14,66	25,81	-	0,93	1,91
25. Gresik	26,89	19,75	31,91	11,48	20,67	0,54	-	-
26. Bangkalan	6,22	9,37	47,78	4,46	18,09	16,39	3,92	-
27. Sampang	5,08	-	55,72	4,73	23,91	19,93	8,88	-
28. Pamekasan	7,15	0,02	46,50	3,64	26,41	22,87	6,11	-
29. Sumenep	6,67	-	30,04	26,88	36,31	8,54	1,70	3,41
71. Kota Kediri	13,22	2,59	52,31	-	21,76	10,44	5,60	1,87
72. Kota Blitar	15,45	7,62	42,51	2,38	33,35	-	2,82	3,70
73. Kota Malang	11,26	44,37	18,04	7,61	23,97	3,58	3,19	-
74. Kota Probolinggo	10,17	8,11	58,12	8,68	39,67	-	6,34	-
75. Kota Pasuruan	25,00	5,41	19,18	8,20	51,22	2,65	3,10	-
76. Kota Mojokerto	16,37	31,64	12,23	3,94	41,10	2,64	-	-
77. Kota Madiun	36,13	9,78	13,93	13,07	38,71	-	-	-
78. Kota Surabaya	12,78	29,48	21,22	19,68	30,21	3,29	-	-
79. Kota Batu	18,58	27,15	44,62	5,95	11,40	-	-	-
Jawa Timur	10,31	10,45	51,45	12,23	20,79	4,62	2,70	1,26

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 5.5.2.
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan, 2019

Kabupaten/Kota	Perempuan							
	RS Peme-rintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktek Dokter Bersama	Puskes- mas/ Pustu	UKBM	Prak- tek Batra	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Pacitan	8,05	1,24	41,51	13,79	32,94	8,45	-	1,81
02. Ponorogo	3,23	11,60	51,18	4,01	25,83	12,15	1,42	-
03. Trenggalek	16,53	1,73	46,15	18,23	13,15	6,96	3,22	4,37
04. Tulungagung	9,57	12,92	42,27	8,47	27,61	6,01	3,78	-
05. Blitar	2,66	3,16	67,43	12,21	5,07	4,28	7,13	3,63
06. Kediri	13,53	14,21	39,95	14,40	32,68	1,41	4,61	-
07. Malang	7,99	11,24	56,74	4,64	14,94	6,34	6,35	-
08. Lumajang	5,37	6,78	48,67	7,75	43,48	10,13	4,26	1,46
09. Jember	7,70	4,11	73,71	5,43	14,93	1,65	-	2,26
10. Banyuwangi	7,86	3,26	61,46	4,48	19,64	4,68	5,21	-
11. Bondowoso	4,27	3,77	54,70	5,97	20,98	15,87	1,40	0,94
12. Situbondo	5,39	9,83	59,37	7,24	22,10	1,16	4,31	2,39
13. Probolinggo	2,31	-	65,69	8,23	19,05	2,96	5,01	5,47
14. Pasuruan	6,23	5,20	56,23	13,49	25,23	2,11	3,89	-
15. Sidoarjo	22,37	20,68	29,51	10,49	23,49	8,44	-	-
16. Mojokerto	2,74	20,77	36,76	9,92	28,75	14,98	2,73	1,07
17. Jombang	5,20	8,61	52,57	20,18	20,81	4,73	1,95	1,78
18. Nganjuk	9,40	3,44	63,03	6,69	19,84	6,18	-	-
19. Madiun	10,07	3,02	48,84	7,08	28,68	6,94	-	4,23
20. Magetan	9,79	1,36	66,57	2,56	17,66	6,13	-	2,36
21. Ngawi	4,38	9,45	58,87	11,63	17,51	-	12,53	-
22. Bojonegoro	-	3,39	71,69	3,68	31,14	2,49	2,33	2,56
23. Tuban	6,69	7,22	64,05	3,82	17,79	10,88	-	3,03
24. Lamongan	2,77	9,39	53,98	17,44	18,95	4,73	-	-
25. Gresik	13,11	11,67	41,16	6,99	33,39	1,16	2,28	-
26. Bangkalan	11,21	2,99	58,62	2,69	6,87	22,20	2,62	2,18
27. Sampang	7,24	3,60	53,52	2,93	42,20	13,16	5,88	-
28. Pamekasan	1,29	2,35	34,53	4,69	33,05	25,04	5,11	2,48
29. Sumenep	9,78	5,28	30,86	3,86	25,62	16,77	1,31	8,83
71. Kota Kediri	11,94	35,75	16,92	6,35	30,46	0,00	-	-
72. Kota Blitar	21,41	4,55	28,06	9,79	44,42	0,00	1,72	2,89
73. Kota Malang	6,15	31,30	24,42	6,52	36,52	2,13	2,50	-
74. Kota Probolinggo	2,09	13,22	62,87	10,92	45,84	-	3,25	-
75. Kota Pasuruan	11,16	4,58	27,26	11,65	44,27	-	5,04	-
76. Kota Mojokerto	6,58	19,61	9,13	1,89	59,62	12,94	-	-
77. Kota Madiun	28,08	6,73	17,91	8,27	39,35	9,86	-	3,42
78. Kota Surabaya	21,12	29,17	20,28	15,86	25,90	1,36	-	-
79. Kota Batu	10,56	29,73	43,89	7,36	15,59	5,31	-	3,50
Jawa Timur	8,26	9,17	51,00	8,91	23,87	6,47	2,95	1,37

Sumber: Susenas, 2019.

Tabel 5.5.3.
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan, 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki + Perempuan							
	RS Peme-rintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktek Dokter Bersama	Puskes-mas/ Pustu	UKBM	Prak-tek Batra	Lain-nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Pacitan	7,99	3,99	47,53	13,13	23,91	7,79	0,49	1,81
02. Ponorogo	4,69	12,58	53,32	3,44	24,08	10,59	0,98	0,83
03. Trenggalek	14,91	2,62	43,61	17,57	17,10	6,96	1,77	5,85
04. Tulungagung	12,45	16,33	37,17	11,68	24,37	4,35	3,64	-
05. Blitar	6,43	6,93	60,31	12,58	8,47	4,27	4,90	3,49
06. Kediri	10,00	14,36	44,12	15,86	23,23	1,57	4,51	-
07. Malang	8,16	14,49	61,89	4,27	14,00	4,70	4,64	-
08. Lumajang	3,12	4,45	55,26	7,11	33,71	12,19	2,48	0,85
09. Jember	7,04	3,67	76,90	5,67	13,69	1,47	0,62	1,01
10. Banyuwangi	10,43	6,40	60,48	7,81	18,37	3,77	4,76	0,45
11. Bondowoso	2,55	5,30	59,92	4,00	20,68	13,63	1,29	1,39
12. Situbondo	13,38	6,47	56,76	9,57	19,50	1,25	3,56	2,51
13. Probolinggo	4,31	-	66,41	7,80	19,66	4,60	6,61	3,67
14. Pasuruan	7,90	13,39	45,50	12,37	21,88	2,12	3,98	0,54
15. Sidoarjo	19,99	18,03	26,43	22,19	31,73	5,56	-	-
16. Mojokerto	5,91	15,12	43,47	4,86	23,93	9,67	4,68	3,58
17. Jombang	9,90	9,62	47,47	20,12	22,75	2,92	2,61	1,10
18. Nganjuk	11,18	4,16	57,15	8,54	21,02	7,00	1,06	-
19. Madiun	17,84	2,16	44,16	7,34	29,26	4,76	1,22	4,96
20. Magetan	11,31	4,19	65,13	3,31	13,71	6,76	1,44	1,33
21. Ngawi	6,24	12,49	53,19	10,29	20,43	-	8,34	-
22. Bojonegoro	2,02	3,19	66,66	4,64	29,53	2,02	1,10	1,63
23. Tuban	4,68	5,31	66,81	7,38	17,06	6,50	1,29	3,44
24. Lamongan	4,89	7,41	54,00	16,19	22,05	2,59	0,42	0,86
25. Gresik	19,64	15,50	36,78	9,11	27,37	0,87	1,20	-
26. Bangkalan	9,31	5,42	54,49	3,37	11,14	19,99	3,12	1,35
27. Sampang	6,29	2,02	54,49	3,72	34,18	16,13	7,19	-
28. Pamekasan	3,96	1,29	39,99	4,21	30,02	24,05	5,57	1,35
29. Sumenep	8,48	3,07	30,52	13,51	30,10	13,32	1,47	6,56
71. Kota Kediri	12,52	20,86	32,81	3,49	26,55	4,69	2,51	0,84
72. Kota Blitar	18,68	5,96	34,67	6,40	39,35	-	2,22	3,26
73. Kota Malang	8,06	36,17	22,04	6,93	31,84	2,67	2,76	-
74. Kota Probolinggo	5,95	10,78	60,60	9,85	42,89	-	4,73	-
75. Kota Pasuruan	17,28	4,95	23,69	10,12	47,35	1,17	4,18	-
76. Kota Mojokerto	10,36	24,26	10,33	2,68	52,45	8,95	-	-
77. Kota Madiun	31,25	7,93	16,34	10,16	39,10	5,97	-	2,07
78. Kota Surabaya	17,74	29,30	20,66	17,41	27,65	2,14	-	-
79. Kota Batu	13,86	28,67	44,19	6,78	13,86	3,12	-	2,06
Jawa Timur	9,19	9,75	51,20	9,60	22,48	5,63	2,84	1,32

Sumber: Susenas, 2019.

<https://jatim.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl Raya Kendangsari Industri No 43-44 Surabaya 60292
Telp: (31) 8439343 ; Fax : (031) 8494007
Homepage: <https://jatim.bps.go.id> Email : bps3500@bps.go.id

ISBN 978-623-7521-44-0



9 786237 521440